

<i>Analisis Framing Robert Entman</i>			
<i>Define Problem</i>	<i>Diagnose Cause</i>	<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Suggest Remedies</i>
1. pendefinisian masalah peristiwa yang terjadi?	1.mengidentifikasi hal yang menjadi sumber masalahnya seperti apa?	1. penilaian moral apa yang diberikan melalui peristiwa ini?	1.penyelesaian masalah ini menawarkan dan membenarkan apa sekiranya yang akan menjadi solusi dari masalah?
2. dampak yang dilihat oleh wartawan dari peristiwa tersebut?	2. siapa yang membuat masalah ini terjadi?	2. apa pengaruhnya dalam pernyataan secara sah nilai moral ini?	2. memprediksi dampak solusinya dalam jangka panjang atau jangka pendeknya?
3. keuntungan peristiwanya apa dengan diukur dalam nilai budaya umum?	3. apa yang menyebabkan masalahnya?		

Bagan 3.1
Alur Berpikir

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Profil Fajarpapua.com

PT. Fajar Papua Mediatama adalah perusahaan yang di dirikan pada tanggal 1 Juli 2020 di Timika – Papua. PT. Fajar Papua Mediatama merupakan perusahaan swasta yang berkepemilikan oleh Stefanus Ambing, Idris Manika, dan Mustofa.

Stefanus Ambing sempat vakum selama 6 tahun dari dunia media dan mulai bergelut kembali di tahun 2020 maka berdirilah Fajarpapua.com. Stefanus Ambing kembali bergelut di bidang media karena melihat media-media di Papua banyak hal yang harusnya diberitakan namun terkadang terlewatkan. Maka Stefanus Ambing punya keinginan untuk mengembalikan media sebagai fungsi kontrol, sehingga inilah yang menjadikan landasan Stefanus Ambing dan beberapa rekannya untuk mencetuskan lahirnya atau berdirinya media Fajarpapua.com.

Perusahaan ini berdiri di bidang media cyber atau media online, advertising, podcast, dan juga live streaming. Fajarpapua.com memiliki kantor redaksi yang berada di Jl. Belibis No.46 Kota Timika – Provinsi Papua (Company Profile, 2022:1).



Gambar 4.1 Logo Fajarpapua.com
Sumber : admin Fajarpapua.com, di akses 23 Agustus 2022

Fajarpapua.com adalah media online yang selalu update setiap hari dengan website yang dibuka oleh ribuan pembaca setiap harinya yang tidak hanya dapat diakses di wilayah Papua, melainkan juga bisa diakses seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Pada usia 7 bulan berdirinya Fajarpapua.com mampu menjadi media online nomor satu sepapua dengan viewers atau pembaca terbanyak berdasarkan AlexaRank (Company Profile, 2022:3).

Fajarpapua.com dengan mottonya yaitu “Memberitakan Kebenaran” mejadi media online yang selalu mengedepankan kebenaran dan keakuratan sebuah berita serta memiliki ciri khas berita yang kritis dan membangun (Company Profile,2022:2)

Adapun visi dan misi Fajarpapua.com yaitu sebagai berikut :

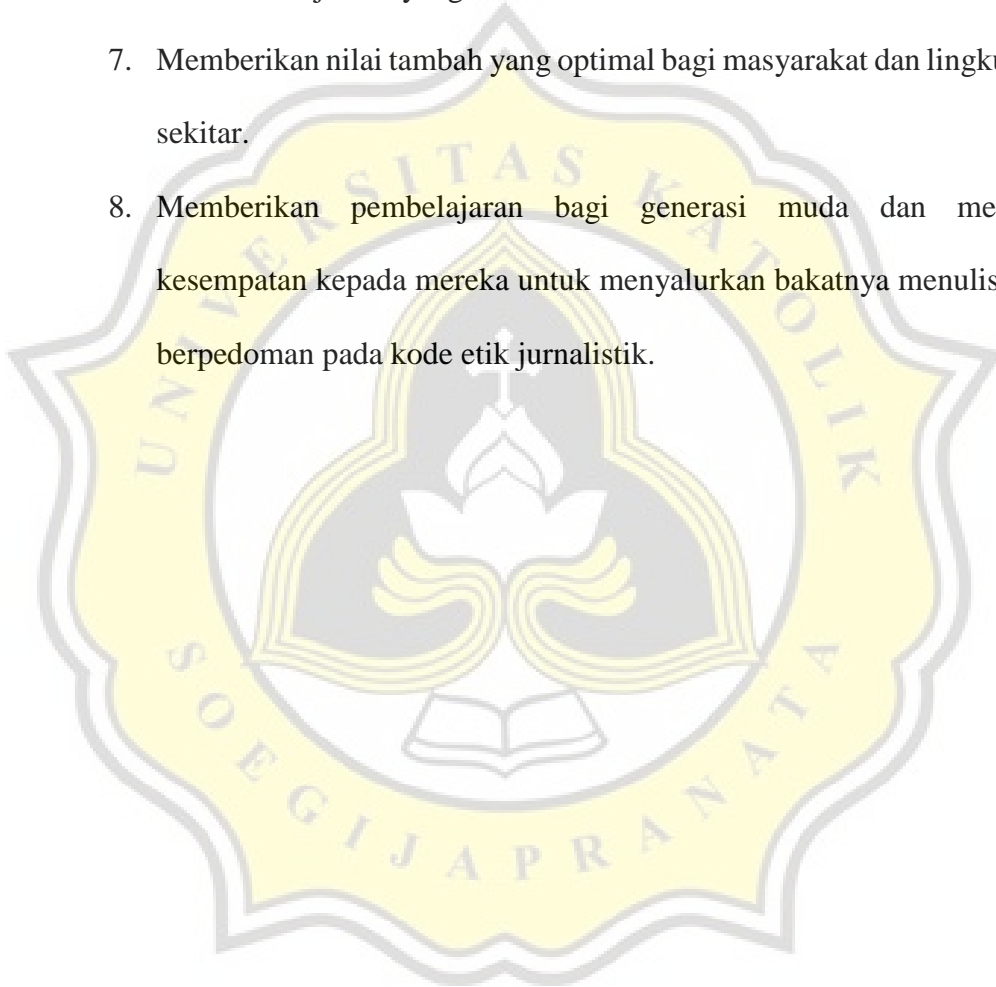
Visi

1. Sebagai media professional memberitakan apa yang sedang terjadi ditengah masyarakat maupun ditubuh pemerintahan.
2. Memberi kontribusi informasi yang berbasis konten lokal tetapi berwawasan global dan mendidik.
3. Menjadi media online yang termuka dan professional di Papua dan Indonesia untuk menyajikan informasi bedasarkan fakta.

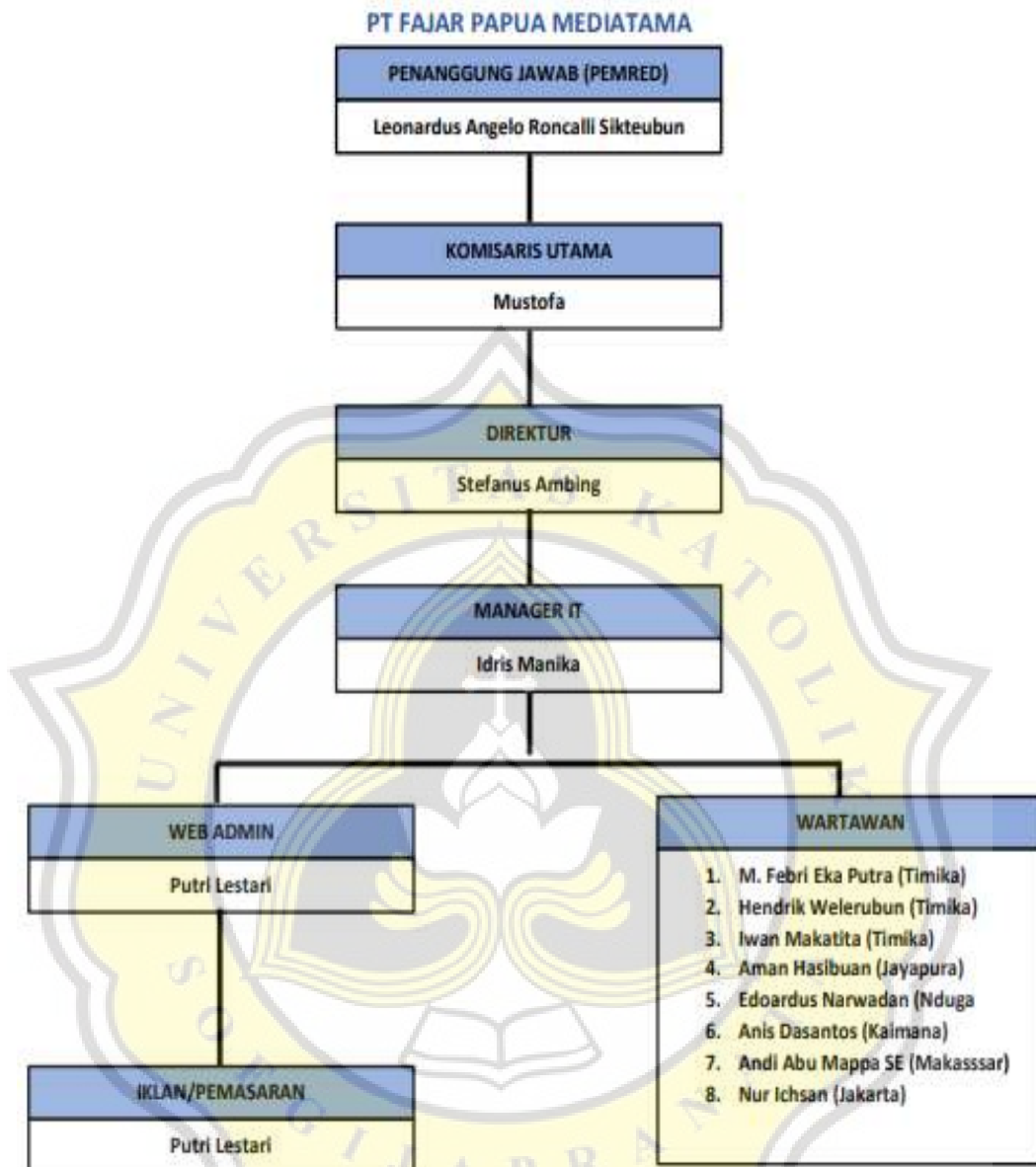
Misi

1. Memberikan akses informasi dan wawasan pada masyarakat.
2. Memberikan berita secara proporsional.

3. Mengembangkan basis pengetahuan masyarakat terhadap daerah.
4. Mengawal kebijakan pemerintah.
5. Memberikan informasi secara online dan berdasarkan fakta yang ada.
6. Mengembangkan SDM dan teknologi informasi dengan menerapkan sistem manajemen yang baik.
7. Memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
8. Memberikan pembelajaran bagi generasi muda dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyalurkan bakatnya menulis yang berpedoman pada kode etik jurnalistik.



Fajarpapua.com memiliki pola tata hubungan unsur-unsur organisasi didalamnya yaitu struktur organisasi pada bagan 4.1 sebagai berikut :



Bagan 4.1
Struktur Organisasi
Sumber : Company Profile Fajarpapua.com 2022

4.2 Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua erat kaitannya dengan sejarah berintegrasinya wilayah yang tadinya merupakan sengketa antara Indonesia dan Belanda ini ke dalam NKRI pada 1969. Pada tahun inilah diadakan PEPERA yang idealnya merupakan penentuan nasib sendiri oleh masyarakat Papua. Dalam konteks ini, Papua merupakan wilayah yang mengalami pergolakan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Dengan demikian, gerakan ini menarik perhatian nasional dan internasional.

Sebelumnya KKB ini di namai sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), dimana OPM didirikan dengan tujuan untuk menggalang dukungan masyarakat Internasional terhadap perjuangan kemerdekaan wilayah Papua. Mereka mencari dukungan melalui PBB hingga mendeklarasikan Papua sebagai bangsa yang berdiri sendiri. Sedangkan Indonesia masih bersikeras bahwa kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke dan Papua Barat masuk kedalamnya. Konflik yang terjadi di Papua antara KKB dan Tentara Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1969 hingga saat ini.

Pada 2021 terjadi 177 pemberitaan pada Tabel 4.1 oleh media Fajarpapua.com dan berdasarkan berita yang diunggah, terdapat beberapa daerah yang dikabarkan pernah terjadi konflik bersangkutan dengan KKB. Yang mana sebanyak 74 pemberitaan dan merupakan daerah dengan jumlah pemberitaan terbanyak terjadi di Kabupaten Puncak.

Berdasarkan temuan data yang diperoleh oleh peneliti, beberapa rangkaian peristiwa yang bersangkutan dengan KKB adalah antara lain pembakaran fasilitas

milik negara, penembakan warga sipil, baku tembak dengan aparat keamanan, hingga pembantaian warga sipil. Berikut pengelompokan peristiwa konflik KKB dengan jumlah kasus yang terjadi :

Tabel 4.1
Pengelompokan Peristiwa KKB di Fajarpapua.com

No.	Peristiwa	Jumlah Peristiwa
1.	TNI-POLRI menguasai markas KKB	1
2.	Pernyataan TNPB-OPM	1
3.	TNI-POLRI menangkap KKB	2
4.	KKB menyandera warga sipil	2
5.	3 anggota KKB menyerahkan diri kepada TNI	2
6.	Pemasok senjata kepada KKB	3
7.	KKB membantai warga sipil	3
8.	Warga sipil mengungsi akibat ulah KKB	3
9.	Pengejaran KKB oleh TNI-POLRI	4
10.	KKB menantang TNI-POLRI	5
11.	KKB membakar fasilitas negara	12
12.	KKB menembak warga sipil	18
13.	KKB dan TNI-POLRI baku tembak	18
Total		74

Sumber : diolah berdasarkan publikasi www.fajarpapua.com
di akses 23 September 2022

Berdasarkan data yang dihasilkan, dua kasus terbanyak diantaranya, adanya KKB dan TNI-POLRI baku tembak (18 berita) dan penembakan warga sipil (18 berita) yang bermukiman di Kabupaten Puncak.

Sebagai akibat dari konflik yang terjadi, banyak masyarakat baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP merasakan trauma dan ketakutan untuk berkeliaran secara bebas karena dibatasi oleh rasa kuatir akan terjadinya kasus yang serupa. Konflik – konflik tersebut juga mengakibatkan sejumlah besar masyarakat memilih untuk pindah ke wilayah pemukiman yang lebih aman, agar mencegah terjadinya

kejadian serupa kepada keluarganya. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan mereka untuk bermukim di wilayah Papua.

Aparat keamanan TNI-POLRI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan pendekatan hukum dengan polri sebagai ujung tombak diterapkan untuk menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh gerakan perlawanan di Papua. Polri melakukan langkah-langkah hukum terhadap kegiatan mobilisasi massa, demonstrasi, dan aksi kekerasan yang melanggar hukum. Sedangkan TNI militer bertugas membantu kepolisian dalam upaya menjaga stabilitas utama keamanan disamping menjaga daerah perbatasan.

Pentingnya berdialog dengan semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan pendekatan menangani konflik baik secara resolusi konflik dan transformasi konflik. Dimana menurut Neles Tebay mengemukakan bahwa konflik kekerasan yang ada di Papua harus dilihat dengan perspektif transformasi konflik yang melampaui resolusi konflik.

Dengan ini resolusi konflik yang dimaksud adalah fokus perhatiannya hanya pada masalah-masalah yang terjadi (substansi dan isi masalah) dan kemudian secara cepat mencari solusinya. Sedangkan transformasi konflik adalah lebih melihat secara mendalam bagaimana konteks dan pola-pola relasi yang melahirkan krisis atau konflik (Tebay, :88-90). Oleh karena itu, hal ini penting saat melihat konflik yang ada di Papua, tidak terbatas hanya “apa masalahnya” kemudian “apa yang harus diselesaikan”.

4.3 Analisis Berita Model Robert Entman

Peneliti melakukan analisis terhadap 18 berita dari media Fajarpapua.com tahun 2021 dengan menggunakan Model Robert Entman. Berikut daftar 18 pemberitaan pada Tabel 4.2 di bawah ini yaitu :

Tabel 4.2
Daftar Pemberitaan KKB dan TNI-POLRI Baku Tembak

No.	Tanggal	Kode Berita	Judul Berita
1.	14 Februari 2021	FP 1	Baku Tembak dengan KKB, Hidung Prajurit TNI Terkena Pantulan Peluru
2.	19 Februari 2021	FP 2	Kontak Senjata di Runway Bandara Ilaga, 1 Anggota KKB Tewas Diterjang Peluru
3.	20 Februari 2021	FP 3	Tera Wamang, Anggota KKB Kodap III Tewas Diberondong Peluru di Bandara Ilaga
4.	26 April 2021	FP 4	Jenazah Kabinda Papua Terbang ke Jakarta, Presiden Jokowi Perintahkan Tangkap Semua KKB
5.	27 April 2021	FP 5	Apakah Polri Terapkan Operasi Tempur Untuk Tumpas KKB di Papua? Ini Jawaban Brigjen Rusdi
6.	27 April 2021	FP 6	5 KKB Tewas, Tiga Tim Satgas Belukar Terkena Tembakan
7.	28 April 2021	FP 7	Satgas Nemengkawi Klaim Sudah Tewaskan 9 Anggota KKB, Serang Markas di Ilaga
8.	29 April 2021	FP 8	Pemerintah Klaim KKB Papua Organisasi Teroris
9.	29 April 2021	FP 9	Usai KKB Dicap Teroris, Gubernur Papua Langsung Bereaksi, Point 5 Wajib Dipertimbangkan!!!
10.	7 Mei 2021	FP 10	Pertemuan Panglima TNI dan Kapolri, Sekda Provinsi Terkait KKB adalah Teroris
11.	8 Mei 2021	FP 11	Tangani KKB Sebagai Teroris, Mantan Wartawan Minta Panglima TNI dan Kapolri Utamakan Hal ini
12.	13 Mei 2021	FP 12	Breaking News!!! TNI Tembak Mati Dua Anggota KKB Papua di Ilaga
13.	14 Mei 2021	FP 13	Cegah KKB Masuk Ilaga, Dua Anggota Satgas Nemengkawi Tertembak
14.	15 Mei 2021	FP 14	Anggota Satgas Nemengkawi Upaya Sekat Warga dari Penyusupan KKB di Ilaga
15.	16 Mei 2021	FP 15	Dua Anggota Teroris KKB Papua Tewas di Ilaga, Satu Senjata Moser dan 17 Amunisi Diamankan, Ini Kronologi Baku Tembaknya

16.	20 Mei 2021	FP 16	20 Hari Pasca Penetapan KKB Sebagai Teroris Terjadi 4 Baku Tembak, 3 Teroris Tewas dan 2 Prajurit TNI-POLRI Gugur, Ini Rentetan Kejadian
17.	8 Juni 2021	FP 17	Teroris KKB Pimpinan Numbuk Telenggen Tembak Mobil Polisi di Ilaga
18.	8 Juli 2021	FP 18	Teroris KKB Tembaki Acara Bakar Batu Yang Dihadiri Bupati Puncak di Ilaga

Sumber : Hasil Temuan Pada Situs Fajarpapua.com

Berdasarkan 18 berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.3 sampai dengan Tabel 4.20 sebagai berikut :

1. FP 1

Berita tanggal 14 Februari 2021 dengan judul berita :

“Baku Tembak dengan KKB, Hidung Prajurit TNI Terkena Pantulan Peluru”.

Timika,fajarpapua.com – Hidung prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kesatuan Yonif 751/MTL terluka akibat terkena rekoset (pantulan-Red) peluru saat terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak, Papua. Saat dikonfirmasi wartawan Minggu (14/2), Dandrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan membenarkan peristiwa baku tembak tersebut. “Iya, dalam kontak senjata yang terjadi pada hari Sabtu sore, Prada Maulana terkena rekoset peluru di bagian hidungnya,” katanya. Korban lanjut Danrem, sekarang ini dalam kondisi stabil dan telah bertugas kembali. “Setelah ditangani paramedis di Puskesmas Ilaga, korban kembali ke pos,” ujarnya. Dikatakan, kontak senjata terjadi saat anggota TNI dan Polri pulang dari melihat kamp dan kendaraan yang dibakar KKB. Saat pulang, itulah rombongan ditembak hingga terjadi baku tembak, kemudian seorang prajurit terkena rekoset. Sebelumnya, Kapolres Puncak AKBP Decky Saragih menyatakan bahwa KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang diduga menjadi pelaku pembakaran kamp dan kendaraan milik PT Unggul. Pembakaran diduga dilakukan pada hari Rabu (10/2) setelah anggota melakukan olah TKP sekaligus mengambil sepeda motor milik korban Rusman Heidar (30) yang dianiaya hingga tewas pada hari Senin (8/2). “Saat mengambil sepeda motor korban, Selasa (9/2), rombongan ditembak hingga terjadi baku tembak,” kata AKBP Saragih.(ant/mas).

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang tembak menembak antara KKB dengan TNI, yang berakibat personel TNI dari Yonif 751/MTL terkena pantulan peluru dari tembakan KKB.

Tabel 4.3
Framing FP 1

<i>Define Problems</i> (mendefinisikan masalah)	Terjadi baku tembak antara TNI dengan KKB, dimana anggota TNI terkena luka tembakan di hidung hingga menderita luka ringan.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang diduga menjadi pelaku pembakaran kamp dan kendaraan milik PT. Unggul. Baku tembak terjadi ketika TNI pulang melihat TKP pembakaran, kelompok KKB menjebak dan terjadi baku tembak.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Dalam kasus ini KKB melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menjebak anggota TNI yang melakukan tugas pemantauan.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Dandrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan telah menyiapkan tim paramedis Puskesmas Ilaga untuk menangani korban.

Berdasarkan hasil framing FP 1, dapat dianalisis bahwa terdapat dua hal dapat dipahami. Pertama, adanya rencana yang dijalankan KKB terkait dengan penyerangan. Kedua, tim Satgas saat itu berada dalam kondisi tidak siap atau tidak siaga untuk terjadinya penyerangan. Dandrem 173/PVB menyatakan bahwa prajurit yang terluka akibat serangan anggota KKB tersebut telah mendapatkan penanganan media dan sudah kembali bertugas.

Pada bagian FP 1 ini, komunikatornya yaitu Dandrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Kapolres Puncak AKBP Dicky Saragih. Pesan yang disampaikan oleh komunikator di dalam berita FP 1, “Setelah ditangani paramedis di Puskesmas Ilaga, korban kembali ke epos,” Memberikan keterangan bahwa benar terjadi baku tembak antara TNI dengan KKB dan salah satu prajurit terkena rekaset.

Penjelasan dari Dandrem memberikan kesan masalah sudah tertangani, dimana prajurit sudah diberikan perawatan dan tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi.

2. FP 2

Berita tanggal 19 Februari 2021 dengan judul berita :

“Kontak Senjata di Runway Bandara Ilaga, 1 Anggota KKB Tewas Diterjang Peluru”

Jayapura, fajarpapua.com – Setelah sebelumnya tiga orang tewas, kali ini satu anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) menemui ajal. Sesuai informasi lapangan, kontak senjata di sekitar *runway* (landasan pacu) Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, menyebabkan satu anggota KKB tewas. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Kamal di Jayapura membenarkan adanya baku tembak di sekitar Bandara Ilaga hingga menewaskan satu anggota KKB. Baku tembak yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu berawal saat KKB menembak di sekitar Bandara Ilaga itu berawal sekitar pukul 09.20 WIT, Jumat (19/2). “Awalnya KKB menembaki anggota Paskhas yang bertugas di Bandara Ilaga hingga terjadi kontak senjata,” kata Kamal. Ia mengatakan bahwa anggota Polres Puncak dan TNI AD yang ada di Ilaga memperkuat anggota Paskhas. Ketika ditanya kekuatan KKB saat kontak senjata, Kamal mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima tercatat lima anggota KKB dengan menggunakan senjata laras pendek. Terkait dengan identitas anggota KKB yang tewas dalam kontak tembak, Kamal mengaku belum tahu pasti identitasnya. “Kami masih menunggu laporan lengkap dari Polres Puncak, ” kata Kombes Pol. Kamal.(ant/red).

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang baku tembak antara KKB dengan TNI-AU di sekitaran landasan pacu Bandara Ilaga yang menyebabkan satu anggota KKB tewas. Adapun analisisnya :

Tabel 4.4
Framing FP 2

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Terjadi baku tembak antara Paskhas, TNI dan POLRI dengan KKB di <i>runaway</i> Bandara Ilaga. Mengakibatkan 1 orang anggota KKB tewas.
--	--

<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	KKB menembak anggota Paskhas TNI AU yang sedang bertugas di Bandara Ilaga sehingga mengakibatkan terjadinya baku tembak.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Penyerangan yang dilakukan oleh anggota KKB terhadap Paskhas yang sedang bertugas memberikan gambaran masih adanya percobaan untuk menguasai Bandara yang merupakan objek vital daerah Kabupaten Puncak Papua.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Aparat penegak hukum dan tim TNI melakukan pertahanan terhadap penyerangan yang dilakukan oleh anggota KKB. Kombes Pol Kamal akan mengkonfirmasi lebih lanjut korban yang tewas dalam baku tembak tersebut.

Berdasarkan framing FP 2 di atas, dapat dianalisis bahwa adanya penyerangan yang dilakukan anggota KKB terhadap Paskhas di Bandara Ilaga. Bandara Ilaga merupakan objek vital pemerintah yang rawan untuk diserang karena fungsinya yang sangat penting dalam mempertahankan perlawanan pemerintah terhadap KKB. Menanggapi penyerangan tersebut, TNI dan POLRI menambah personel penjagaan di sekitaran bandara.

Pada bagian FP 2 ini, komunikatornya yaitu Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Kamal. Pesan yang disampaikan oleh komunikator pada FP 2, disampaikan Kombes Pol Ahmad Kamal “Awalnya KKB menembaki anggota Paskhas yang bertugas di Bandara Ilaga hingga terjadi kontak senjata”. Dalam keterangannya Kombes Kamal mencoba untuk menerangkan kronologi kejadian baku tembak di Bandara Ilaga, yang diawali oleh anggota KKB menembaki petugas di Bandara.

3. FP 3

Berita tanggal 20 Februari 2021 dengan judul berita :

“Tera Wamang, Anggota KKB Kodap III Tewas Diberondong Peluru di Bandara Ilaga”.

Jayapura, fajarpapua.com – Identitas korban tewas dalam aksi kontak tembak antara aparat TNI/Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Runway Bandara Ilaga terungkap. Dia adalah Tera Wamang. Menurut Kapolres Puncak, Papua AKBP Dicky Saragih, Tera Wamang merupakan anggota dari Kodap III. Korban diduga baru tiba dari Beoga, Intan Jaya. “Kalau dari anggota TNI-Polri tidak ada yang terluka. Baku tembak berlangsung sekitar dua setengah jam,” ungkap Kapolres Dicky. Dikemukakan, penembakan diawali dari KKB ke anggota TNI-AU yang berjaga di bandara. Kontak tembak mulai terjadi sekitar pukul 09.20 WIT. Anggota Polres Puncak dibantu TNI langsung memperkuat personel yang berjaga di bandara. Jenazah Tera Wamang masih berada di Puskesmas Ilaga. Tercatat, selama bulan Februari dua warga sipil menjadi korban penganiayaan yang dilakukan KKB di Kabupaten Puncak, yakni tanggal 9 Februari seorang tukang ojek dianiaya hingga meninggal dunia. Selanjutnya Selasa (16/2) seorang ibu rumah tangga mengalami luka-luka, setelah dianiaya KKB yang berpura-pura hendak membeli di kiosnya yang menjual barang kelontongan. Kodap III dipimpin Egianus Kogoya yang wilayah operasinya berawal di Kabupaten Nduga, namun kini diduga sudah bergabung dengan kelompok KKB lainnya di sekitar Kabupaten Puncak.(ant/red)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang satu orang anggota KKB bernama Tera Wamang tewas akibat terkena tembakan peluru oleh TNI-AU.

Tabel 4.5
Framing FP 3

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Korban jiwa pada baku tembak di Bandara Ilaga adalah Tera Wamang, yang merupakan anggota KKB Kodap III Pimpinan Egianus Kogoya.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	KKB yang melakukan penembakan kepada anggota TNI-AU yang sedang berjaga di Bandara Ilaga.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Penyerangan ini menjadi peristiwa ke sekian, dimana sebelumnya KKB melakukan dua penyerangan terhadap warga sipil di wilayah Puncak.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	TNI dan POLRI memperkuat pertahanan di wilayah Bandara Ilaga karena adanya penyerangan tersebut.

Berdasarkan hasil framing FP 3 di atas, dapat dianalisis bahwa Tim Satgas Namengkawi berhasil mengidentifikasi anggota KKB yang tewas dalam peristiwa baku tembak di Bandara Ilaga. Keterangan dari Kapolres Puncak, anggota Satgas tidak ada yang terluka. Penembakan terjadi pada pukul 09.20 WIT di runway Bandara Ilaga. KKB melakukan penganiayaan sebelum insiden ini terjadi, setidaknya 2 penganiayaan terjadi pada tanggal 9 Februari dan 16 Februari 2021.

Pada bagian FP 3 ini, komunikatornya yaitu Kapolres Puncak AKBP Dicky Saragih. Pesan komunikator dalam berita FP 3 “kalau dari anggota TNI-Polri tidak ada yang terluka. Baku tembak berlangsung sekitar dua setengah jam”. Hal ini disampaikan Kapolres Puncak, memberikan gambaran bahwa baku tembak yang terjadi dimenangkan oleh TNI-Polri, dimana baku tembak menewaskan Tera Wamang yang merupakan anggota KKB Kodap III Pimpinan Egianus Kogoya.

4. FP 4

Berita tanggal 26 April 2021 dengan judul berita :

“Jenazah Kabinda Papua Terbang ke Jakarta, Presiden Jokowi Perintahkan Tangkap Semua KKB”.

Jakarta, fajarpapua.com – Jenazah Kepala BIN Daerah Papua Brigjen Putu Danny sudah diterbangkan ke Jakarta, Senin sekitar pukul 14.25 menggunakan penerbangan Batik Air. Kematian pimpinan dari pasukan elit Kopassus itu membuat negara benar-benar geram. Apalagi Brigjen Putu Danny dikenal sangat dekat dengan rakyat Papua. Teranyar, Presiden RI Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. “Saya juga perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Presiden menegaskan tidak ada tempat bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Tanah Air Indonesia, termasuk Papua. “Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya. Kepala Negara menyampaikan duka cita mendalam dan menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny atas pengabdian, dedikasinya, dan pengorbanan yang telah dilakukan. “Atas nama bangsa, rakyat, dan negara saya sampaikan

duka cita mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan,” ujarnya. Sebelumnya Brigjen TNI I Gusti Putu Danny pada Minggu (25/4) terjebak aksi saling tembak dengan kelompok bersenjata saat Satuan Tugas BIN dan Satgas TNI/Polri berada di perjalanan menuju Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4). Putu Danny diketahui turun langsung karena hendak melakukan observasi lapangan guna mempercepat pemulihan keamanan di wilayah tersebut. “Sekitar pukul 15.50 WIT, Satgas BIN dan Satgas TNI/Polri dihadang oleh kelompok separatis dan teroris (KST) Papua, sehingga terjadi aksi saling tembak di sekitar gereja Kampung Dambet. Akibat kontak tembak tersebut, Kabinda Papua tertembak dan gugur sebagai pahlawan di lokasi kejadian,” menurut keterangan Deputy VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, pada Senin.(ant/boy)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.6 sebagai berikut:Berita tersebut berisi tentang pasca kematian Kabinda Papua I Gusti Putu Danny Nugraha. Kepala Negara yaitu Presiden Jokowi memerintahkan menangkap semua KKB.

Tabel 4.6
Framing FP 4

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Kematian Kepala BIN Daerah Papua Brigjen Putu Danny terjebak aksi saling tembak dengan KKB ketika Satuan Tugas BIN dan Satgas TNI-POLRI menuju Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang menghadang Satgas BIN dan Satgas TNI-POLRI saat perjalanan menuju Kampung Dambet.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Presiden Jokowi memberikan bentuk apresiasi menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Kabinda Brigjen I Putu Danny atas pengabdian, dedikasi, dan pengorbanannya.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Menanggapi peristiwa ini Presiden RI Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB.

Berdasarkan framing FP 4 di atas, dapat dianalisis bahwa negara semakin geram terhadap perilaku anggota KKB yang menewaskan Kabinda Papua Putu Danny, dimana Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri agar permasalahan Papua segera diselesaikan. Dalam perintahnya Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak memberikan tempat untuk

kelompok-kelompok kriminal bersenjata di Tanah Papua dan seluruh NKRI. Selain itu Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Puwanto memberikan keterangan terkait kronologi tembak menembak di Kampung Dambet tersebut.

Pada bagian FP 4 ini, komunikator politiknya yaitu Presiden RI Joko Widodo dan Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto. Pesan komunikator dalam berita FP 4, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo “saya juga perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB”. Pesan yang bisa ditangkap ialah adanya ketegasan dan keseriusan Pemimpin Negara untuk menumpas anggota KKB, dengan instruksi yang dimandatkan kepada Panglima TNI dan Kapolri.

5. FP 5

Berita tanggal 27 April 2021 dengan judul berita :

“Apakah Polri Terapkan Operasi Tempur Untuk Tumpas KKB di Papua? Ini Jawaban Brigjen Rusdi”

Jayapura, fajarpapua.com – Instruksi Presiden Jokowi agar anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) segera dikejar dan ditangkap, langsung direspon Polri. Saat ini, Polri mengoptimalkan pengejaran anggota KKB yang melakukan aksi kekerasan, pengrusakan hingga penembakan di Papua. “Kami terus bekerja optimal melakukan pengejaran, penangkapan terhadap KKB. Tidak ada tempat bagi KKB di tanah Papua,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Selasa. Dikemukakan, Polri-TNI dan instansi lainnya bekerja secara optimal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan KKB di Tanah Papua. Namun demikian keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi perhatian utama aparat keamanan di Papua. “Banyak korban beberapa hari belakang ini menjadi perhatian aparat keamanan di sana, sekali lagi aparat keamanan beserta yang lain bekerja optimal, KKB dapat ditangani secara optimal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Rusdi. Saat ditanya apakah Polri akan menambah jumlah personel mengingat intensitas kekerasan yang dilakukan KKB semakin meningkat selama dua pekan terakhir. Menurut Rusdi, jumlah personel yang ada saat ini sudah mencukupi untuk memburu dan menindak tegas KKB. “Karena di sana selain kegiatan-kegiatan maupun operasi yang dilakukan Polda Papua, Polri juga menggelar Operasi

Nemangkawi, digelar gabungan yaitu personel TNI dan Polri. Sampai saat ini Polri belum menambah kekuatan di Papua,” kata Rusdi. Polri juga telah mengidentifikasi kelompok yang melakukan penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Brigjen Putu IGP Danny Nugraha. “Sudah teridentifikasi kelompok yang main di wilayah Puncak, Papua, dari kelompok teridentifikasi, menunggu perkembangan saja, yang jelas aparat keamanan telah mengidentifikasi kelompok yang lakukan aksi kejahatan,” kata Rusdi. Polri tetap mengedepankan Operasi Nemangkawi dalam penegakan hukum untuk menumpas KKB. Menurut Rusdi, Polri belum akan menerapkan operasi tempur untuk memberantas KKB seperti yang diusulkan pengamat intelijen, karena berbeda kebijakan. “Operasi tempur itu kebijakan yang lain, yang jelas Polri menggelar Operasi Nemangkawi, operasi penegakan hukum. Kalau masalah seperti itu (operasi tempur-red) mungkin ada kebijakan lain. Kalau Polri melaksanakan Operasi Nemangkawi,” ujar Rusdi. Sebelumnya, Kasatgas Nemangkawi Brigjen Pol Roycke Harry Langie mengatakan Operasi Nemangkawi TNI-Polri sudah berlangsung sebanyak 5 kali, dan saat tahap I di tahun 2021, dengan menggelar pasukan sebanyak 1.186 orang.(ant/red).

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang pasca kematian Kabinda Papua, respon POLRI dalam pengoptimalan pengejaran KKB di Papua.

Tabel 4.7
Framing FP 5

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Polri merespon instruksi Presiden untuk menumpas habis KKB.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Instruksi Presiden untuk menumpas habis kelompok KKB, akibat dari meninggalnya Kepala BIN wilayah Papua, Putu Danny Nugraha.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengakui bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi perhatian utama aparat keamanan di Papua.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekan solusi)	Polri belum melakukan operasi tempur seperti yang disarankan pengamat Intelijen karena berbeda kebijakan, saat ini mengoptimalkan Operasi Nemangkawi, yaitu Operasi Penegakan Hukum.

Berdasarkan hasil framing FP 5 di atas, dapat dianalisis bahwa sikap polri dalam merespon instruksi Presiden untuk menumpas anggota KKB menggunakan metode

operasi gabungan bernama Satgas Nemangkawi. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Polri belum akan menggunakan Operasi Tempur dan akan memaksimalkan program Operasi Nemangkawi untuk mengejar dan menumpas KKB di Papua.

Pada bagian FP 5 ini, komunikatornya yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi H. pesan yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, “kami terus bekerja optimal melakukan pengejaran, penangkapan terhadap KKB. Tidak ada tempat bagi KKB di tanah Papua”. Pernyataan tersebut, merupakan respon atas instruksi Presiden kepada aparat keamanan. Pesan yang ditangkap ialah adanya amanah yang dijalankan secara maksimal tanpa mengurangi tingkat keselamatan warga sipil di daerah konflik. Dipertegas dalam keterangannya, “banyak korban beberapa hari belakang ini menjadi perhatian aparat keamanan di sana, sekali lagi aparat keamanan beserta yang lain bekerja optimal, KKB dapat ditangani secara optimal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.”. Pesan yang dikandung, bahwa aparat keamanan sudah mengetahui dan memiliki strategi untuk mengatasi kondisi terkini yang mulai mengkhawatirkan.

Pernyataan lain yaitu “operasi tempur itu kebijakan yang lain, yang jelas Polri menggelar Operasi Nemangkawi, operasi penegakan hukum. Kalau masalah seperti itu operasi tempur mungkin ada kebijakan lain. Kalau Polri melaksanakan Operasi Nemangkawi.” Merupakan penegasan bahwa ada perbedaan antara Operasi Nemangkawi dengan Operasi tempur merupakan kebijakan lain, namun Polri sudah memiliki rencananya sendiri yaitu Operasi Nemangkawi.

6. FP 6

Berita tanggal 27 April 2021 dengan judul berita :

“5 KKB Tewas, Tiga Tim Satgas Belukar Terkena Tembakan”

Kontak senjata terjadi Selasa (27/4) sekitar pukul 08.00 WIT di sekitar Markas Lumawi, Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Informasi yang diperoleh fajarpapua.com, Selasa sore, kontak tembak antara Tim Satgas Ops Nemangkawi Polri dan TNI dengan kelompok KKB pimpinan Lekagak Telenggen mengakibatkan 5 KKB tewas sedangkan 3 anggota Tim Satgas Belukar terkena tembakan, satu diantaranya meninggal dunia. Anggota Satgas yang tertembak yakni Ipda Anton Tonapa Dantim Bravo 9 Belukar (terkena pada bagian bahu). Bripda Muhammad Saifudin (terkena paha atas) dan satu anggota Brimob (Satgas Nemangkawi) atasnama Bharada Komang meninggal dunia. Sementara masih dilakukan upaya evakuasi oleh Helli Karakal dari Bandara Ilaga menuju TKP di Kampung Lumawi untuk dievakuasi ke Bandara Timika. Namun Heli Karakal masih ditembaki oleh kelompok KKB dan sementara masih standby di Bandara Aminggaru Ilaga untuk melakukan evakuasi lanjutan. Adapun rencana alternatif akan dilakukan evakuasi melalui jalan darat menggunakan kendaraan Roda 4, apabila heli karakal tidak bisa tembus masuk ke Markas Lumawi. Kapolda Papua Irjen Pol Drs Mathius Fakhiri membenarkan peristiwa itu. Dikatakan satu anggota Brimob atas nama Barada Komang meninggal dunia terkena tembakan. (tim)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang baku tembak KKB pimpinan Lekagak Telenggen dan TNI-POLRI Satgas Operasi Nemangkawi di sekitaran Markas Lumawi, Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.8
Framing FP 6

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Terdapat 5 anggota KKB tewas dan 3 Satgas Operasi Nemangkawi terkena tembakan, 1 diantaranya meninggal.
<i>Diagnose Cause</i>	Terjadi baku tembak antara Tim Operasi Nemangkawi (gabungan TNI dan POLRI) dengan KKB Pimpinan Lekagak Telenggen.

(memperkirakan penyebab masalah)	
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Baku tembak yang terjadi pada 27 April 2021 tersebut mengakibatkan 4 orang tewas (3 orang KKB dan 1 orang anggota Satgas).
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Evakuasi yang dilakukan menggunakan Heli, namun kendalanya heli tersebut ditembakki KKB, sehingga rencana alternative yang dilakukan adalah evakuasi jalur darat.

Berdasarkan framing FP 6 di atas, dapat dianalisis bahwa baku tembak yang terjadi antara Tim Satgas Operasi Nemangkawi berhasil menumbangkan 3 orang anggota KKB Pimpinan Lekagak Telengen pada 27 April 2021. Sementara menurut keterangan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Mathius Fakhiri, terdapat 3 orang anggota KKB yang terkena tembakan yaitu, Ipa Anton Tonapa Dantim Bravo 9 Belukar (terkena tembakan dibagian bahu), Bripda Muhammda Saifudin (tertembak dibagian paha atas), dan Bharada Komang Meninggal dunia. Evakuasi korban tim Satgas menemui kendala ketika hendak dievakuasi melalui jalur udara, dimana heli krakal ditembakki anggota KKB di Bandara Aminggaru. Sehingga tim memutuskan untuk mengevakuasi korban menggunakan jalur darat.

Pada bagian FP 6 ini, komunikatornya yaitu Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. Pesan komunikator disampaikan oleh Kapolda Papua, pernyataan yang dikutip oleh jurnalis Fajarpapua.com Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Mathius Fakhiri memberikan keterangan bahwa satu prajurit gugur, namun 5 anggota KKB tewas pula dalam baku tembak yang terjadi. pemberitaan ini mengesankan adanya perbedaan jumlah korban yang disebabkan peristiwa, dimana 5 anggota KKB berhasil ditumpas.

7. FP 7

Berita tanggal 28 April 2021 dengan judul berita :

“Satgas Nemangkawi Klaim Sudah Tewaskan 9 Anggota KKB, Serang Markas di Ilaga”

Jayapura, fajarpapua.com – Kontak senjata antar TNI-Polri melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus menelan korban. Satgas Nemangkawi mengklaim sembilan anggota KKB tewas dalam baku tembak yang terjadi di sekitar markas KKB di Olenski, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. “Dari laporan yang diterima bahwa sembilan anggota KKB tewas dalam kontak senjata,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol. Iqbal Al Qupdusy di Jayapura, Rabu (28/4). Kombes Iqbal belum bisa memastikan identitas anggota KKB yang tewas karena anggota TNI/Polri masih berupaya mencapai markas kelompok tersebut. Namun yang pasti dari kelompok Lekagak Telenggen. Ditegaskan, Lekagak Telegen masuk dalam DPO Kepolisian Daerah Papua sejak 2020 dengan nomor DPO/43/VIII/2020/Reskrim Mimika, tertanggal 28 Agustus 2020 dalam kasus penembakan di Mile 61 saat perjalanan dari Arwanop ke Tsinga. Kepastian tentang tewasnya sembilan anggota KKB itu, kata Kombes Pol. Iqbal, berasal dari peralatan yang dimiliki. “Akan diketahui pasti setelah anggota mencapai dan menguasai markas KKB,” ujarnya. Pengejaran terhadap KKB masih terus dilakukan walaupun pada hari Selasa (27/4) Bharada Komang gugur dan dua lainnya mengalami luka tembak. Sebelumnya, anggota KKB menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu Danny di Kampung Dambet, Distrik Beoga, dan dua orang guru serta seorang pelajar SMAN 1 Ilaga, Kabupaten Puncak.(ant/red)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang perkembangan anggota Satgas Namengkawi di

Markas Ilaga. Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.9
Framing FP 7

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Operasi Nemangkawi sudah menumbangkan 9 anggota KKB disekitaran Markas KKB di Olenski, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak.
<i>Diagnose Cause</i>	Kelanjutan dari Operasi Nemangkawi yang dimaksimalkan karena KKB menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu Danny Nugraha di

(memperkirakan penyebab masalah)	Kampung Dambet, Distrik Beoga, dan 2 orang Guru SMAN 1 Ilaga, Kabupaten Puncak.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Operasi Gabungan Namengkawi berhasil menekan KKB dan berusaha untuk menguasai Markas KKB Lekagak Telenggen. Adapun pimpinan KKB yaitu Lekagak Telenggen telah masuk ke dalam DPO.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Operasi Namengkawi melakukan usaha untuk menguasai markas KKB di Olenski, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak.

Berdasarkan hasil framing FP 7 di atas, peneliti menganalisis adanya indikasi keberhasilan Operasi Nemangkawi dengan tewasnya 9 orang anggota KKB pada baku tembak di Olenski, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Satgas Operasi Namengkawi terus memburu baik pimpinan ataupun anggota KKB Lekagak Telenggen.

Pada bagian FP 7 ini, komunikatornya yaitu Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Al Qupdusy. Pesan komunikator disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Humas Namengkawi Satgas Nemangkawi mengklaim sembilan anggota KKB tewas dalam baku tembak yang terjadi di sekitar markas KKB di Olenski, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Hal ini memberikan kesan keamanan dan klaim bahwa kekuatan dari KKB bisa tertangani dengan baik.

8. FP 8

Berita tanggal 29 April 2021 dengan judul berita :

“Pemerintah Klaim KKB Papua Organisasi Teroris”

Jakarta, fajarpapua.com – Melakukan rentetan tindakan pembunuhan terhadap warga sipil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan organisasi atau kelompok kriminal

bersenjata (KKB) sebagai teroris. Mahfud menyampaikan sikap Pemerintah itu saat jumpa pers secara daring di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, terkait peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir ini. Kelompok sipil bersenjata di Papua dikategorikan sebagai teroris, kata Mahfud, berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam UU itu disebutkan, teroris adalah orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan, terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. “Nah berdasarkan definisi yang dicantumkan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris,” ujar Mahfud. Pemerintah sendiri, lanjut dia, sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Badan Intelijen Negara, Pimpinan Polri, TNI, dan fakta bahwa banyak tokoh masyarakat, tokoh adat Papua, pemerintah daerah dan anggota DPRD Papua yang datang ke Pemerintah, dalam hal ini ke Kantor Kemenko Polhukam menyatakan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindakan-tindakan kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. “Jadi, yang dinyatakan Ketua MPR, BIN, TNI, Polri, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka (KKB, Red) melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pula. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur tertembak oleh KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua, Minggu (25/4/2021).(ant)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang pasca kematian Kabinda Papua dan banyaknya korban atas tindakan KKB, Pemerintah Pusat mengkategorikan KKB masuk sebagai kelompok terorisme. Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.10
Framing FP 8

<i>Define Problem</i>	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menyatakan bahwa KKB sebagai teroris.
-----------------------	--

(pendefinisian masalah)	
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Akibat dari serentetan penyerangan dan kekerasan yang dilakukan KKB, sehingga pemerintah mengkategorikan KKB sebagai teroris dengan dasar UU pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Teroris.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Pengkategorian KKB sebagai gerakan teroris merupakan sikap tegas pemerintah untuk tidak memberikan ruang bagi kelompok yang hendak memecah belah NKRI.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan KKB merupakan kelompok teroris, yang mana hal ini didukung oleh pernyataan dari Ketua MPR, BIN, TNI, POLRI, dan tokoh-tokoh Papua.

Berdasarkan hasil framing FP 8 di atas, dapat dianalisis bahwa Pemerintah Indonesia dengan tegas mengkategorikan KKB Papua sebagai kelompok teroris yang perlu untuk ditumpas. Pengkategorian KKB sebagai kelompok teroris sesuai dengan bunyi dari UU Nomor 5 Tahun 2018, dimana teroris merupakan orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme merupakan setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memunculkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan berpotensi menimbulkan korban secara massal serta menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis.

Pada bagian FP 8 ini, komunikatornya yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Mahfud MD. Pesan yang disampaikan yaitu “nah berdasarkan definisi yang dicantumkan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris,” ujar Mahfud. Hal ini disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam, dimana Perwakilan

Negara memberikan penegasan tentang KKB merupakan anggota teroris yang harus dibasmi atau ditumpas.

9. FP 9

Berita tanggal 29 April 2021 dengan judul berita :

“Usai KKB Dicap Teroris, Gubernur Papua Langsung Bereaksi, Point 5 Wajib Dipertimbangkan”.

Timika, fajarpapua.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe pada Kamis (29/4) mengeluarkan pernyataan resmi terkait penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris. Melalui rilis yang diterima awak media, Kamis malam, Gubernur menekankan sejumlah point. Pertama, terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut Kedua, Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM. Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Gubernur berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum. Keempat, Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menasar penduduk sipil Papua. Kelima, Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan. Keenam, Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB Ketujuh, Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga gubernur menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru. Pernyataan Gubernur Papua disampaikan melalui Juru Bicara Muhammad Rifai Darus.(boy).

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang respon Gubernur Papua Lukas Enembe terkait penetapan KKB sebagai kelompok teroris oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Adapun analisis sebagai berikut :

Tabel 4.11
Framing FP 9

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Respon Gubernur Papua Lukas Enembe terkait pemberian label teroris terhadap KKB yang tertuang dalam 7 poin pernyataan, disampaikan oleh Juru Bicaranya Rifao Darus pada 29 April 2021.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Respon Gubernur terkait langkah Pemerintah Pusat menetapkan KKB sebagai teroris perlu untuk dikaji kembali.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Fajarpapua mengkhawatirkan dengan poin 5 yaitu “pemberian label teroris kepada KKB dapat memberikan dampak Psikososial terhadap warga Papua di perantauan dengan terbentuknya stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua di perantauan.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Lukas Enembe memberikan sudut pandang yang secara umum disimpulkan bahwa pemberian label akan mengakibatkan beberapa dampak untuk masyarakat Papua baik yang berada di Papua ataupun masyarakat Papua yang berada di perantauan.

Berdasarkan framing FP 9 di atas, dapat dianalisis bahwa Gubernur Papua melakukan langkah saling menguntungkan terkait dengan aktivitas KKB dan respon Pemerintah Pusat. Lukas menerangkan dalam poin-poin respon yang disampaikan jubirnya yakni, adanya langkah pemerintah untuk memastikan tidak adanya stigma yang tersebar di Masyarakat Indonesia terkait dengan Masyarakat Papua, harus adanya cara pemetaan yang jelas terkait dengan struktur, bentuk organisasi, dan karakteristik anggota KKB, sehingga tidak terjadi salah tangkap atau lebih parahnya salah tembak. Lukas Enembe juga meminta untuk Pemerintah

Pusat berkonsultasi dengan PBB terkait pemberian kategori teroris dan menekan perlakuan yang mengedepankan pendekatan keamanan daripada terjadinya baku tembak.

Pada bagian FP 9 ini, komunikatornya yaitu Gubernur Papua Lukas Enembe. Penjelasan dari Lukas Enembe dalam tujuh poin respon Gubernur Papua atas predikat Teroris yang dilekatkan pada KKB, memiliki pesan kepentingan yang membuat pembaca merasakan adanya kesetujuan dan ketidaksetujuan secara bersamaan dari Gubernur Papua Lukas Enembe.

10. FP 10

Berita tanggal 7 Mei 2021 dengan judul berita :

“Pertemuan Panglima TNI dan Kapolri, Sekda Provinsi Terkait KKB adalah Teroris”

Timika, fajarpapua.com – Sekda Provinsi Papua Dance Y. Flassy mewakili Pemerintah Provinsi menghadiri pertemuan bersama Panglima TNI dan Kapolri di Rimba Papua Hotel, Jumat (7/5). Sekda Dance kepada wartawan usai pertemuan mengatakan Pemerintah Provinsi siap mengikuti arahan ataupun petunjuk dari Pemerintah Pusat termasuk Panglima TNI dan Kapolri. “Dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Papua maka Forkompinda Papua harus terus menjaga dan mempertahankan sinegritas negara kesatuan,” ujarnya. Mewakili Pemerintah Provinsi, Sekda Dance juga mengaku sedang menyelesaikan beberapa agenda terkait pelantikan bupati, kekosongan kursi jabatan, kursi otsus dan lainnya. “Ini juga yang ditunggu masyarakat agar secepatnya selesai,” ucapnya. Dijelaskan, pada pertemuan itu sempat disinggung terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak, dimana menurutnya peristiwa tersebut sudah ditangani langsung oleh negara. “Semua ditangani oleh negara, kita percayakan kepada Pemerintah Pusat, dalam beberapa waktu kedepan ini ditargetkan bisa selesai,” kata Dance. Sedangkan terkait pembahasan KKB yang disebut teroris Sekda Dance mengatakan Pemerintah Provinsi mengklarifikasi pernyataan tersebut. “Berhubung saat ini menghadapi otsus dan kegiatan Puncak maka diharuskan untuk membangun kebersamaan dan membangun solidaritas dari seluruh komponen,” ungkapnya tanpa merinci lebih detail. Dia juga berharap Polhukam mendeteksi dini isu-isu maupun informasi miring di kalangan masyarakat Papua. “Kami harap desk Papua di Polhukam segera dihidupkan kembali,” harap Dance. Ia menjelaskan Pemerintah Pusat selalu hadir jika ada sesuatu yang terjadi di Kabupaten ataupun daerah-daerah konflik. “Intinya seluruh lapisan komponen kita harus bangun komunikasi bersama

masyarakat khususnya kondisi Papua yang sangat luas, maka harus ada kebersamaan dengan masyarakat kita yang ada di nusantara ini,” pungkasnya. (rul)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.12 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang sikap Pemerintah Daerah Papua terkait dengan langkah Pemerintah Pusat dalam menangani kasus KKB di Papua. Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.12
Framing FP 10

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Dialog antara Sekda Papua Dance Y. Flassy dengan Kapolri dan Panglima TNI, terkait dengan pemberian label teroris KKB Papua.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Pentingnya untuk menangani permasalahan KKB secara bersama-sama setiap komponen yang terlibat, baik masyarakat Papua, Pemerintah Daerah Papua dan Pemerintah Pusat.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Sekda Papua meminta untuk Menteri Polhukam untuk mendeteksi dini potensi-potensi isu-isu informasi miring yang beredar di Masyarakat Papua, sebagai dampak dari penetapan KKB sebagai kelompok teroris.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Sekda Papua menyatakan adanya beberapa poin yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani kasus KKB ini.

Berdasarkan hasil framing FP 10 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah diwakili oleh Sekda Papua menyatakan mendukung langkah Pemerintah Pusat dalam penanganan permasalahan KKB. Namun Sekda meminta kepada Menko Polhukam untuk bisa mendeteksi lebih dini dampak Psikososial yang menyebar di masyarakat Papua terkait pengkategorian KKB sebagai teroris. Sekda Papua juga menerangkan bahwa Pemerintah Daerah saat ini sedang

memaksimalkan penyelesaian agenda pemerintah daerah antara lain pelantikan Bupati, mengisi kekosongan kursi jabatan, kursi otsus, dan lainnya.

Pada bagian FP 10 ini, komunikatornya yaitu Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy. Pesan komunikator dari pernyataan yang disampaikan oleh Sekda Papua “semua ditangani oleh negara, kita percayakan kepada Pemerintah Pusat, dalam beberapa waktu kedepan ini ditargetkan bisa selesai”, dapat diartikan sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah atas perintah dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.

11. FP 11

Berita tanggal 8 Mei 2021 dengan judul berita :

“Tangani KKB Sebagai Teroris, Mantan Wartawan Minta Panglima TNI dan Kapolri Utamakan Hal Ini”

Timika, fajarpapua.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua meminta Panglima TNI dan Kapolri mengutamakan penegakan hukum dibanding tindakan-tindakan operasi dalam menangani Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) Papua.

Permintaan ini disampaikan Ketua Komnas HAM Papua, Frits Bernard Ramandey se usai pertemuan bersama Panglima TNI dan Kapolri di Rimba Hotel Papua, Jumat (7/5). “Itu jauh lebih penting. Dengan pendekatan penegakan hukum maka operasi dan tindakan-tindakannya akan terukur,” tegasnya. Terkait dengan keputusan pemerintah yang menetapkan KKB sebagai kelompok teroris, Frits yang juga mantan wartawan ini mengatakan, dalam pertemuan itu Komnas HAM memberikan catatan dari prespektif kemanusiaan. “Kami menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri bahwa organisasi TPN-KKB tersebut sudah ada sejak lama, hanya saja pelabelan sebagai kelompok teroris baru dilakukan,” jelasnya. Oleh sebab itu Komnas HAM meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri dalam penanganan terhadap kelompok ini harus mempertimbangkan dua misi utama. “Pertama yaitu tentang penegakan hukum sedangkan yang kedua yaitu harus mempertimbangkan dan menghormati prinsip-prinsip musuh. Dengan demikian operasi-operasi penanganan terhadap KKB tidak menimbulkan problem HAM yang baru di masyarakat,” kata Frits. Selain itu Komnas HAM Papua juga meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri agar menata pola komunikasi diantara satuan-satuan keamanan yang ditugaskan pasca penetapan KKB menjadi kelompok teroris. “Yang terpenting adalah penegakan hukum tapi juga harus ada operasi kemanusiaan,” ucap

Frits. Mantan Ketua Aluansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura ini menjelaskan memang belum ada undang-undang di Komnas HAM terkait pelabelan teroris, kendati demikian pihaknya tetap harus memiliki fungsi mediasi. “Terkait masalah di Papua, kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah kelompok yang berafiliasi dengan KKB. Dari pandangan mereka ada bermacam-macam pendapat terkait penetapan KKB sebagai kelompok teroris,” kata Frits. Dalam kesempatan itu Frits menyampaikan terimakasih kepada Panglima TNI dan Kapolri yang bersedia tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) serta menata pola komunikasi di antara satuan-satuan keamanan baik itu Kogabwilhan, Kodam dan Polda agar tidak menimbulkan kegaduhan terkait operasi penanganan KKB diantara satuan-satuan yang ada. Kepada Panglima TNI dan Kapolri, Frits juga meminta agar satuan-satuan keamanan yang dikirim ke Papua terlebih dahulu diberikan pembekalan tentang kulture pola kebudayaan yang ada di Papua. “Jangan langsung dikirim ke wilayah konflik seperti Nduga, Puncak Jata, ataupun Ilaga. Padukan harus dibekali pengetahuan terkait budaya Papua, sehingga mereka tidak serta merta melihat warga yang membawa panah, pegang parang sebagai ancaman padahal belum tahu itu warga sipil atau KKB,” untkannya. (rul)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.13 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang pendapat Komnas HAM wilayah Papua terkait langkah Pemerintah Pusat dalam menangani KKB di Papua. Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.13
Framing FP 11

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Komnas HAM Papua meminta untuk mengedepankan hukum daripada tindakan operasi.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Komnas HAM yang juga mantan wartawan Frits Bernard Ramandey itu berpendapat pada pertemuannya dengan Kapolri dan Panglima TNI dari perspektif kemanusiaan.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Perlu ditekankannya prinsip-prinsip HAM dalam menangani kasus KKB ini, jangan sampai menimbulkan permasalahan HAM baru.

<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Perwakilan Komnas HAM Papua Frits memberikan saran kepada pihak penanganan kasus KKB ini untuk menekankan unsur mediasi daripada kekerasan.
--	---

Berdasarkan framing FP 11 di atas, dapat dianalisis bahwa keberadaan kelompok KKB ini sudah ada sejak lama, namun baru saja dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah di bawah kewenangan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan yang didasari pada UU No. 5 Tahun 2018. Perwakilan Komnas HAM Papua yang juga mantan wartawan Frits berpendapat bahwasanya pihaknya telah melakukan beberapa komunikasi dengan anggota yang berafiliasi dengan KKB, Frits menggali pendapat anggota tersebut terkait dengan perkembangan KKB dikategorikan sebagai teroris.

Tidak lupa Frits menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Panglima TNI yang tetap memegang teguh prinsip HAM selama menjalankan operasi penyelesaian konflik dengan KKB, serta memberikan saran kepada Kapolri dan Panglima untuk setiap petugas keamanan diberikan pembekalan terlebih dahulu tentang budaya masyarakat di Papua sebelum diterjunkan dilapangan. Hal ini berfungsi agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan dan salah sasaran.

Pada bagian FP 11 ini, komunikatonya yaitu Ketua Komisi Nasional HAM Papua Frits Bernard Ramandey. Pesan komunikator berdasarkan pernyataan dari Frits “kami menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri bahwa organisasi KKB tersebut sudah ada sejak lama, hanya saja pelabelan sebagai kelompok teroris baru dilakukan.” Merupakan hasil dari pengalamannya di lapangan dan menelaah kondisi nyata, dan hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan baik pusat ataupun daerah dalam menyusun strategi penyelesaian konflik di Papua.

12. FP 12

Berita tanggal 13 Mei 2021 dengan judul berita :

“Breaking News!!! TNI Tembak Mati Dua Anggota KKB Papua di Ilaga”

Timika, fajarpapua.com- Anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum Nemangkawi, pada Kamis (13/5) dilaporkan terlibat aksi baku tembak dengan Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Dalam kontak tembak yang terjadi di Kampung Wuloni, Ilaga, Kabupaten Puncak tersebut dua anggota teroris KKB Papua dilaporkan tewas. Data yang dihimpun fajarpapua.com menyebutkan, peristiwa tersebut berawal saat anggota Satgas Nemangkawi melakukan patroli. Setibanya di Kampung Wuloni, Satgas Nemangkawi mendapat informasi adanya pergerakan anggota KKB Papua disekitar wilayah tersebut. Informasi itu langsung ditindaklanjuti, kemudian anggota Satgas Nemangkawi dengan dibantu personil dari Kopasus TNI AD melakukan pengejaran. Dan akhirnya terjadi kontak senjata dengan anggota Teroris KKB Papua yang berusaha kabur ke dalam hutan di wilayah itu. Dalam kontak tembak yang berlangsung sengit itu, diketahui dua anggota Teroris KKB Papua tewas tertembus peluru. Peristiwa kontak tembak ini dibenarkan oleh Pangdam Cendrawasih, Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono seperti yang dilansir sejumlah media online Nasional. “Betul ada kontak tembak di sekitar Kampung Wuloni, Illaga,” kata Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono saat dihubungi Kamis (13/5). Dikatakan Pangdam, pihaknya menerima laporan dalam kontak senjata tersebut tim TNI berhasil menewaskan dua anggota KKB. Dijelaskan juga bahwa saat ini situasi di lokasi kontak tembak belum sepenuhnya kondusif dan masih dilakukan pembersihan. “Laporan yang saya dapat sampai saat ini ada dua orang KSB tewas dan masih diadakan pembersihan,” jelasnya. Meski demikian Pangdam menegaskan, pihaknya masih belum dapat memberikan memastikan adanya penemuan senjata milik anggota Teroris KKB Papua yang mati tertembak. “Untuk penemuan senjata dan yang lain belum terkonfirmasi,” pungkasnya. (mas/on)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.14 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang baku tembak KKB dan TNI-POLRI di Kampung Wuloni, Ilaga, Kabupaten Puncak yang mengakibatkan dua anggota teroris KKB tewas. Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.14
Framing FP 12

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Baku tembak antara Tim Satgas Nemangkawi dengan anggota KKB di Kampung, Ilaga, Kabupaten Ilaga, Kabupaten Puncak.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Adanya pergerakan dari anggota KKB saat Satgas Namengkawi melakukan Patroli. Sehingga personel Kopassus ikut turun tangan untuk melakukan pengejaran anggota KKB yang kabur ke hutan.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Tindakan represif Satgas Nemangkawi ketika adanya pergerakan anggota KKB di wilayah sipil, ditindaklanjuti dengan pengejaran ke hutan dan menewaskan dua anggota KKB.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Saat ini pihak Satgas masih melakukan pembersihan terkait dengan peristiwa baku tembak dan memastikan kepemilikan senjata dari anggota KKB yang tewas.

Berdasarkan framing FP 12 di atas, dapat dianalisis bahwa peristiwa menunjukkan adanya tindakan tegas aparat penegak hukum dengan tidak memberikan ruang gerak terkait aktivitas KKB. Baku tembak yang terjadi di Kampung Wuloni, Ilaga tidak dapat dihindari. Hal ini berawal saat anggota Satgas sedang melakukan Patroli di Kampung Wuloni dan mendapat informasi adanya pergerakan anggota KKB di wilayah tersebut.

Pada bagian FP 12 ini, komunikatornya yaitu Panglima Kodam Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono. Pesan komunikator berdasarkan pernyataan dari Mayjen Ignatius “Laporan yang saya dapat sampai saat ini ada dua orang KKB tewas dan masih diadakan pembersihan.” Menyiratkan perbedaan bahasa yang digunakan, dimana ada kata pembersihan untuk mayat anggota KKB yang tewas dalam baku tembak.”

13. FP 13

Berita tanggal 14 Mei 2021 dengan judul berita :

“Cegah KKB Masuk Ilaga, Dua Anggota Satgas Nemangkawi Tertembak”

Jayapura, fajarpapua.com – Dua anggota Satgas Nemangkawi terluka akibat terkena rekaset saat terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Wuloni, Kabupaten Puncak, Kamis (13/5). Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri menyatakan kondisi mereka stabil karena hanya terkena rekaset di tangan dan tubuh bagian belakang. Sementara dalam aksi baku tembak yang terjadi Kamis pagi tercatat seorang anggota KKB Lesmin Waker tewas di sekitar Kampung Wuloni, yang letaknya cukup jauh dari Ilaga. “Lokasi kontak senjata jauh dari Ilaga dan anggota berhasil mengamankan berbagai barang bukti, termasuk dokumen dan bendera Bintang Kejora,” kata Fakhiri, Jumat. Ketika ditanya apakah satgas sudah menguasai markas KKB di kawasan itu, Kapolda Papua mengatakan belum sepenuhnya dikuasai. Namun, anggota sudah melakukan penyekatan. “Yang pasti kami berupaya agar KKB tidak masuk Ilaga, kemudian memisahkan mereka dari masyarakat,” paparnya. Kapolda menegaskan saat ini seluruh anggota Satgas Nemangkawi bersiaga.(ant/red)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.15 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang baku tembak KKB dan anggota Satgas Nemangkawi di Kampung Wuloni Kabupaten Puncak. Adapun analisisnya yaitu :

**Tabel 4.15
Framing FP 13**

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Anggota Satgas Namengkawi mencegah KKB masuk ke wilayah Ilaga, alhasil terjadi baku tembak. Namun, dari baku tembak tersebut tidak adanya korban jiwa, 2 anggota satgas hanya terkena luka tembakan.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Anggota Satgas mencegah masuknya anggota KKB di wilayah Ilaga.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Dalam hal ini adanya usaha untuk mempertahankan daerah yang dijaga, sehingga adanya baku tembak antara tim Satgas dengan anggota KKB.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Usaha mempertahankan dilakukan untuk mencegah masuknya anggota KKB ke wilayah Ilaga.

Berdasarkan framing FP 13 di atas, dapat dianalisis adanya usaha yang konsistensi dari tim Satgas dalam menumpas KKB, termasuk memperkecil ruang geraknya serta mempersulit akses kepada Masyarakat. Pada berita juga diterangkan bahwa saat ini memang belum seluruhnya, namun tim satgas berhasil menduduki markas KKB di Kampung Wuloni.

Pada bagian FP 13 ini, komunikatornya yaitu Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. Pernyataan dari Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan kondisi mereka stabil karena hanya terkena rekoset di tangan dan tubuh bagian belakang. Pesan komunikator memberitakan bahwa prajurit yang terkena rekoset berada dalam kondisi yang sehat, agar masyarakat dan khalayak pembaca menjadi aman dan tidak khawatir terkait kondisi terkini di wilayah konflik tersebut.

14. FP 14

Berita tanggal 15 Mei 2021 dengan judul berita :

“Anggota Satgas Nemangkawi Upaya Sekat Warga dari Penyusupan KKB di Ilaga” Jayapura, fajarpapua.com – Dalam rangka memudahkan pengejaran, saat ini Anggota Satgas Nemangkawi berupaya menyekat warga sipil dari penyusupan KKB. Hal itu dikemukakan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Sabtu (15/5). Dikatakan, anggota sudah melakukan penyekatan agar KKB tidak bisa bergabung dengan warga sipil. “Sekarang Satgas Nemangkawi dari anggota TNI dan Polri berupaya melakukan penyekatan-penyekatan agar KKB tidak lagi leluasa bergerak,” ujarnya. Ia berharap apa yang dilakukan dapat membuahkan hasil. Saat ini situasi kamtibmas di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak relatif kondusif setelah Kamis (13/5) sempat terjadi kontak tembak di Wuloni hingga menewaskan satu anggota KKB.(ant/red).

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.16 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang langkah Satgas Nemangkawi melakukan penyekatan pergerakan KKB dari permukiman warga sipil di Ilaga Kabupaten Puncak. Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.16
Framing FP 14

<i>Define Proble</i> (pendefinisian masalah)	Langkah penyekatan Satgas agar KKB sulit untuk melebur dengan warga sipil.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Dilakukan dengan tujuan agar KKB tidak bisa bergerak bebas di wilayah konflik dan berinteraksi dengan warga sipil.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Langkah ini ditujukan agar ruang gerak KKB semakin sempit dan kemungkinan KKB untuk menyusup ke warga sipil semakin sulit.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Solusi ini dinilai efektif agar KKB kian kesulitan bergerak dan melebur dengan warga sipil.

Berdasarkan hasil framing FP 14 di atas, dapat dianalisis bahwa aparat penegak hukum dan tim Satgas merasa yakin dengan langkah penyekatan mobilitas di wilayah Ilaga, hal ini diharapkan dapat memberi hasil positif dimana tidak menjalarnya ideology-ideologi dimiliki KKB dan sulitnya akses atau mobilitas KKB untuk menyusup ke warga sipil. Pada hari Kamis 13 Mei 2021, sempat terjadi baku tembak di wilayah Wuloni yang menyebabkan tewasnya 1 anggota KKB.

Pada bagian FP 14 ini, komunikatornya yaitu Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. Pesan komunikator dari pernyataan yang disampaikan Kapolda Papua “sekarang Satgas Nemangkawi dari anggota TNI dan Polri berupaya melakukan penyekatan-penyekatan agar KKB tidak lagi leluasa bergerak”. Pesan ini memberikan kejelasan terkait dengan adanya indikasi yang terbaca oleh Satgas

Namengkawi mengenai meleburnya anggota KKB dengan warga sipil. Bagi warga sipil, sebenarnya hal ini merupakan peringatan halus yang diberikan untuk tidak berinteraksi dengan anggota KKB.

15. FP 15

Berita tanggal 16 Mei 2021 dengan judul berita :

“Dua Anggota Teroris KKB Papua Tewas di Ilaga, Satu Senjata Moser dan 17 Amunisi Diamankan, Ini Kronologi Baku Tembaknya”

Timika, fajarpapua.com – Anggota TNI/Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Nemangkawi terlibat baku tembak dengan Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Jembatan Mayuberi, Ilaga, Minggu (16/5) dini hari. Akibat baku tembak yang berlangsung hampir satu jam tersebut, dua anggota Teroris KKB Papua dipastikan tewas tertembus peluru. Dari informasi yang dihimpun fajarpapua.com diketahui, baku tembak tersebut berawal saat operasi Satgas Nemangkawi pada pukul 03.19 WIT di sekitar Jembatan Mayuberi yang selama ini dikuasai Teroris KKB Papua, tiba-tiba mendapat tembakan. Dari pengamatan diketahui, serangan bersenjata tersebut diduga dilakukan oleh tiga orang anggota Teroris KKB Papua. Kemudian, personil Satgas Nemangkawi yang terdiri dari anggota TNI dan Polri membalas serangan sehingga terjadi baku tembak. Setelah berselang hampir satu jam atau sekira pukul 04.12 WIT, pasukan TNI dan Polri berhasil menembak tiga anggota Teroris KKB Papua yang diduga dibawah komando Lekagak Talenggeng. Dari tiga orang anggota Teroris KKB Papua yang berhasil ditembak, dua orang teroris ditemukan tewas dan satu orang lainnya diduga melarikan diri dengan kondisi tertembak. Personil Satgas Nemangkawi yang melakukan penyisiran di tempat kejadian perkara berhasil menemukan barangbukti dua jasad anggota teroris, satu pucuk senjata organik jenis Moser 7,62, satu buah HT, amunisi 17 butir dan empat selongsong peluru. Dalam keterangan yang dirilis media online, Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudusy membenarkan tewasnya dua anggota Teroris KKB Papua dalam kontak tembak di Jembatan Mayuberi pada Minggu dinihari WIT tadi. Dikatakan saat ini TNI-Polri masih melakukan penyisiran di sekitar TKP kontak tembak dan melakukan pengejaran terhadap satu orang anggota Teroris KKB Papua yang melarikan diri dengan membawa 1 AK 47 yang diduga milik rekannya yang tewas tertembak. Kombes Alqudusy menegaskan, paska baku tembak, Satgas Nemangkawi berhasil menguasai wilayah di Camp Mayuberi. Ditegaskan pula, pihaknya akan terus melakukan pengejaran dan melakukan penegakan hukum terhadap anggota Teroris KKB Papua terutama yang ada di Mimika, Intanjaya, Nduga, dan Ilaga. (mas).

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.17 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang keberhasilan tim Satgas Namengkawi dalam baku tembak dengan KKB di Jembatan Mayuberi. Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.17
Framing FP 15

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Terjadi baku tembak antara tim Satgas Namengkawi dengan anggota KKB di Jembatan Mayuberi, Ilaga pada Minggu 16 Mei 2021.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Adanya serangan yang dilakukan secara mendadak dari anggota KKB kepada personel Satgas di Jembatan Mayuberi yang selama ini dikuasai KKB. Alhasil 3 anggota KKB berhasil ditembak, dua diantaranya tewas dan 1 orang melarikan diri.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Keberhasilan Satgas dalam memenangkan baku tembak dan menguasai wilayah Kamp Mayuberi.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Personel yang melakukan penyisiran berhasil mengumpulkan bukti dua jasad anggota KKB dan satu pucuk senjata organik jenis Mooser 7.62, satu buah HT, amunisi 17 butir dan 4 selongsong peluru.

Berdasarkan framing FP 15 di atas, dapat dianalisis bahwa tim Satgas bergerak secara taktik dalam memperkecil wilayah KKB, dimana alhasil Jembatan Mayuberi dan Kamp Mayuberi yang tadinya dikuasai oleh KKB berhasil dikuasai dan 2 orang anggota KKB tewas.

Pada bagian FP 15 ini, komunikatornya yaitu Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Iqbal Al Qudusy. Pesan komunikator yang disampaikan oleh Kombes Iqbal “Kombes Alqudusy menegaskan, paska baku tembak, Satgas Nemangkawi berhasil menguasai wilayah di Kamp Mayuberi”, memberikan pesan adanya keberhasilan yang dicapai tim Satgas Namengkawi terkait dengan penguasaan salah satu markas KKB oleh Satgas Namengkawi.

16. FP 16

Berita tanggal 20 Mei 2021 dengan judul berita :

“20 Hari Pasca Penetapan KKB Sebagai Teroris Terjadi 4 Baku Tembak, 3 Teroris Tewas dan 2 Prajurit TNI-POLRI Gugur, Ini Rentetan Kejadian”

Timika, fajarpapua.com – Belum genap sebulan atau tepatnya sekitar 20 hari sejak penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Kelompok Teroris setidaknya terjadi 4 kali baku tembak di sejumlah wilayah di Papua. Dari catatan yang ada, akibat baku tembak tersebut tercatat sedikitnya 3 orang anggota Teroris KKB Papua tewas tertembak. Sementara dari prajurit TNI maupun Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi tercatat ada 2 personil yang gugur serta beberapa yang mengalami luka. Berikut ini peristiwa baku tembak antara Satgas Nemangkawi dan Teroris KKB Papua yang telah menewaskan 8 Teroris dan tiga prajurit TNI/Pokriv pada Bulan April dan Mei 2021 atau pasca penetapan Kelompok Teroris yang dihimpun fajarpapua.com dari berbagai sumber. Baku tembak pertama terjadi pada 13 Mei 2021 terjadi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dalam peristiwa ini, satu anggota Teroris KKB Papua tewas ditembus peluru, sementara di kubu TNI dan Polri dilaporkan tidak terdapat korban. Tiga hari berselang atau pada 16 Mei 2021, baku tembak kembali terjadi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak atau tepatnya di Camp Mayuberi. Kontak tembak ini tercatat menewaskan dua anggota Teroris KKB Papua dan satu teroris lainnya berhasil melarikan diri meski dalam keadaan luka. Kemudian pada 18 Mei 2021, Teroris KKB Papua yang diidentifikasi dari kelompok pimpinan Senaf Soll menyerang pos Pos Batalion Lintas Udara 432 Kostrad di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dalam peristiwa ini, 2 prajurit TNI dinyatakan gugur dan dua unit senjata perorangan SS-1 dinyatakan hilang. Pada hari yang sama, juga terjadi kontak senjata di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang mengakibatkan 4 prajurit luka. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat seperti dimuat di sejumlah media mengatakan, setidaknya ada empat peristiwa kontak senjata setelah KKB Papua ditetapkan sebagai Kelompok Teroris. “Sejak ditetapkannya oleh pemerintah sebagai kelompok teroris sejak 29 April yang lalu, memang sampai hari ini sudah terjadi beberapa kontak senjata. Misalnya tanggal 27 April terjadi kontak senjata di Ilaga, di mana 1 prajurit Brimob gugur, 2 lainnya luka-luka. Tetapi ada 5 teroris tewas,” kata Mahfud. Mahfud menyebut ada peningkatan keberhasilan dalam penanganan teroris KKB di Papua. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemerintah akan lebih tegas terhadap teroris KKB di Papua, bukan terhadap masyarakat Papua. “Jadi sekarang kita lebih tegas, khusus terhadap kelompok itu, bukan terhadap rakyat Papua, bukan terhadap Papua, karena Papua itu etnis, budaya dan tempat. Tapi kalau teroris bisa di mana saja,” ucap Mahfud. Terus Kejar Teroris KKB Papua! Prajurit TNI dan Polri serta pemerintah daerah dengan dukungan pusat akan melakukan tindakan cepat, tegas serta terukur terhadap Teroris KKB Papua. Mahfud menegaskan aparat keamanan terus melakukan pengejaran dan melumpuhkan kelompok kecil tersebut. Mahfud mengatakan langkah pendekatan tidak lagi ampuh terhadap kelompok kecil tersebut. “Aparat keamanan akan terus mengejar dan melumpuhkan para pelaku teror untuk melindungi masyarakat agar merasa aman, dari tindakan teror yang

dilakukan dari kelompok kecil orang, tapi mengganggu,” ujarnya. “Karena selama ini kita lebih mendahulukan pendekatan-pendekatan, tentu puluhan tahun pendekatan yang kecil ini nggak sadar juga, bahkan yang besar itu sudah tidur damai nggak ada masalah dengan republik ini,” lanjut Mahfud. Mahfud mengatakan pengejaran itu dilakukan secara hati-hati dan fokus sehingga tidak mengorbankan warga sipil. “Kedua pengejaran terhadap segelintir orang, termasuk KKB, sebagai pelaku teror dilakukan secara hati-hati dan fokus sehingga tidak menimbulkan korban dari warga sipil,” ujarnya. Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan penentuan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris dapat memisahkan antara masyarakat sipil dan pelaku teror. Dia mengatakan langkah aparat untuk memisahkan itu dijamin oleh undang-undang bukan karena kesewenang-wenangan. “Dengan demikian setelah dilakukan KKB sebagai kelompok teroris aparat keamanan cukup berhasil memisahkan antara masyarakat sipil dan para pelaku teror. Jadi tugasnya itu memisahkan, yang digunakan mereka bukan kesewenang-wenangan tapi UU nomer 5 tahun 2018, yang dianggap sebagai tindak pidana teroris, artinya itu penegakan hukum yang nanti di dalam pelaksanaannya ada penempatan berdasarkan kesepakatan TNI-Polri,” tuturnya. (mas/dll)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.18 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang rentetan kejadian baku tembak pasca penetapan anggota KKB sebagai teroris. Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.18
Framing FP 16

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	20 hari pasca penetapan KKB sebagai teroris, telah terjadi 4 baku tembak antara Satgas Namengkawi dengan anggota KKB
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Penetapan KKB sebagai kelompok teroris yang harus ditumpas.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Adanya perlawanan dari anggota KKB atas label yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Pemerintah akan lebih tegas dalam menumpas habis anggota KKB, dan menyatakan adanya peningkatan keberhasilan dalam penangkapan anggota KKB.

Berdasarkan hasil framing FP 16 di atas, dapat dianalisis bahwa sepanjang bulan April hingga Mei 2021, total terdapat 8 teroris KKB dan 3 anggota Satgas yang tewas. Tanggal 13 Mei 2021, terjadi baku tembak di Distrik Ilaga, satu orang anggota KKB tewas. Tanggal 18 Mei 2021, anggota KKB kelompok Pimpinan Senaf Soll menyerang pos Batalyon Lintas Udara 432 Kostrad di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Penyerangan tersebut mengakibatkan 2 anggota TNI gugur dan unit senjata SS-1 hilang. Pada hari yang sama terjadi kontak senjata di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, 4 prajurit terluka. Pemerintah mengatakan bahwa penetapan KKB sebagai kelompok teroris menghasilkan keberhasilan. Adapun pemisahan antara kelompok KKB dengan warga sipil dinilai cukup berhasil, dan menegaskan bahwa langkah aparat dalam melakukan penegakan hukum didasari pada UU Nomor 5 Tahun 2018 dan bukan karena sewenang-wenangan.

Pada bagian FP 16 ini, komunikatornya yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Mahfud MD. Menko polhukam memberikan keterangan terkait perkembangan dari Aparat TNI maupun Polri dalam penyelesaian konflik Papua. Pernyataan Mahfud yaitu “sejak ditetapkannya oleh pemerintah sebagai kelompok teroris sejak 29 April yang lalu, memang sampai hari ini sudah terjadi beberapa kontak senjata. Misalnya tanggal 27 April terjadi kontak senjata di Ilaga, dimana prajurit Brimob gugur, 2 lainnya luka-luka. Tetapi ada 5 teroris tewas.” Pesan yang ditangkap bahwa adanya perlawanan yang dilakukan KKB terkait penetapan kelompok KKB sebagai teroris.

17. FP 17

Berita tanggal 8 Juni 2021 dengan judul berita :

“Teroris KKB Pimpinan Numbuk Telenggen Tembak Mobil Polisi di Ilaga”

Jayapura, fajarpapua.com – Kontak tembak terjadi antara aparat keamanan dan teroris KKB di sekitar Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu menyebabkan kendaraan taktis (rantis) Polri terkena tembakan. Kapolres Puncak Kompol Nyoman Punia, Selasa, mengatakan aksi kontak tembak terjadi Senin (7/6). Ketika dihubungi dari Jayapura, Kapolres Puncak mengaku, tembakan itu mengenai badan mobil. Baku tembak yang terjadi di kawasan Bandara Aminggaru Ilaga itu dengan kelompok Numbuk Telenggen yang merupakan anak buah Lekagak Telenggen. Ia menduga Lekagak Telenggen sudah bergeser. Namun, ke mana yang bersangkutan melarikan diri, pihaknya belum mengetahui pasti lokasinya. Kendati situasi kamtibmas di Ilaga dan sekitarnya saat ini relatif kondusif, aparat keamanan tetap bersiaga. “Aktivitas masyarakat, khususnya di Ilaga, tampak normal,” kata Kompol Nyoman.(ant)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.19 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang baku tembak KKB kelompok Numbuk Telenggen dan aparat keamanan POLRI di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga Kabupaten Puncak.

Adapun analisisnya yaitu :

Tabel 4.19
Framing FP 17

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Kontak senjata terjadi di sekitar Bandara Aminggaru Ilaga, akibatnya kendaraan Taktis milik Polri terkena tembakan di bagian badan mobil.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Adanya penyerangan dari anggota KKB Numbuk Telenggen yang merupakan anak buah dari Lekagak Telenggen.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Adanya penyerangan terhadap fasilitas pendukung Polri, dengan harapan dapat mengurangi kemampuan Satgas untuk menumpas anggota KKB.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	Tim Satgas sedang melakukan investigasi terkait keberadaan Lekagak Telenggen. Tim Satgas mengatakan aktivitas warga cenderung normal dan situasi masih kondusif.

Berdasarkan framing FP 17 di atas, dapat dianalisis bahwa diketahui adanya usaha KKB untuk melumpuhkan pertahanan tim Satgas Namengkawi dengan cara menembaki kendaraan Taktis. Namun demikian, situasi dapat dikendalikan oleh aparat di lapangan dan aktivitas warga cenderung normal dan kondusif.

Pada bagian FP 17 ini, komunikatonya yaitu Kapolres Puncak Kumpul Nyoman Punia. Pernyataan dalam berita FP 17 ini disampaikan oleh Kapolres Puncak, “Aktivitas masyarakat, khususnya di Ilaga, tampak normal”. Pesan yang bisa ditafsirkan adanya pengendalian massa, agar situasi terkendali, sehingga Kapolres sebagai pimpinan memberikan kabar yang menyejukkan bagi warganya.

18. FP 18

Berita tanggal 8 Juli 2021 dengan judul berita :

“Teroris Tembaki Acara Bakar Batu Yang Dihadiri Bupati Puncak di Ilaga”
Jayapura, fajarpapua.com – Kelompok bersenjata, sekitar pukul 13.30 WIT Kamis, mengganggu acara bakar batu di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, dengan cara menembaki peserta dari kejauhan. Komandan Korem 173/PVB, Brigadir Jenderal TNI Iwan Setiawan, di Papua, Kamis, mengakui ada kontak tembaki di Ilaga yang diawali gangguan kelompok bersenjata saat acara bakar batu yang dihadiri bupati, komandan Kodim, kepala Polres serta pejabat dan warga di wilayah itu. Gangguan itu kemudian direspon anggota TNI-Polri yang memang bersiaga dan tidak ada korban jiwa. “Acara bakar batu itu sendiri dilakukan sebagai bentuk rasa syukur mulai pulihnya kondisi keamanan di wilayah itu,” kata Setiawan yang dihubungi dari Jayapura. Dari laporan yang diterima, anggota TNI-Polri mengejar mereka dan menyisir lokasi. Namun dia belum bisa memastikan kelompok mana yang mengganggu acara bakar batu itu. “Ada kemungkinan yang mengganggu adalah kelompok Lekagak Telenggen atau kelompok Teri Mayu yang berada di sekitar muara,” kata dia.(ant)

Berdasarkan berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.20 sebagai berikut:

Berita tersebut berisi tentang penyerangan KKB saat acara bakar batu yang dihadiri oleh Bupati Puncak. Adapun analisisnya yaitu:

Tabel 4.20
Framing FP 18

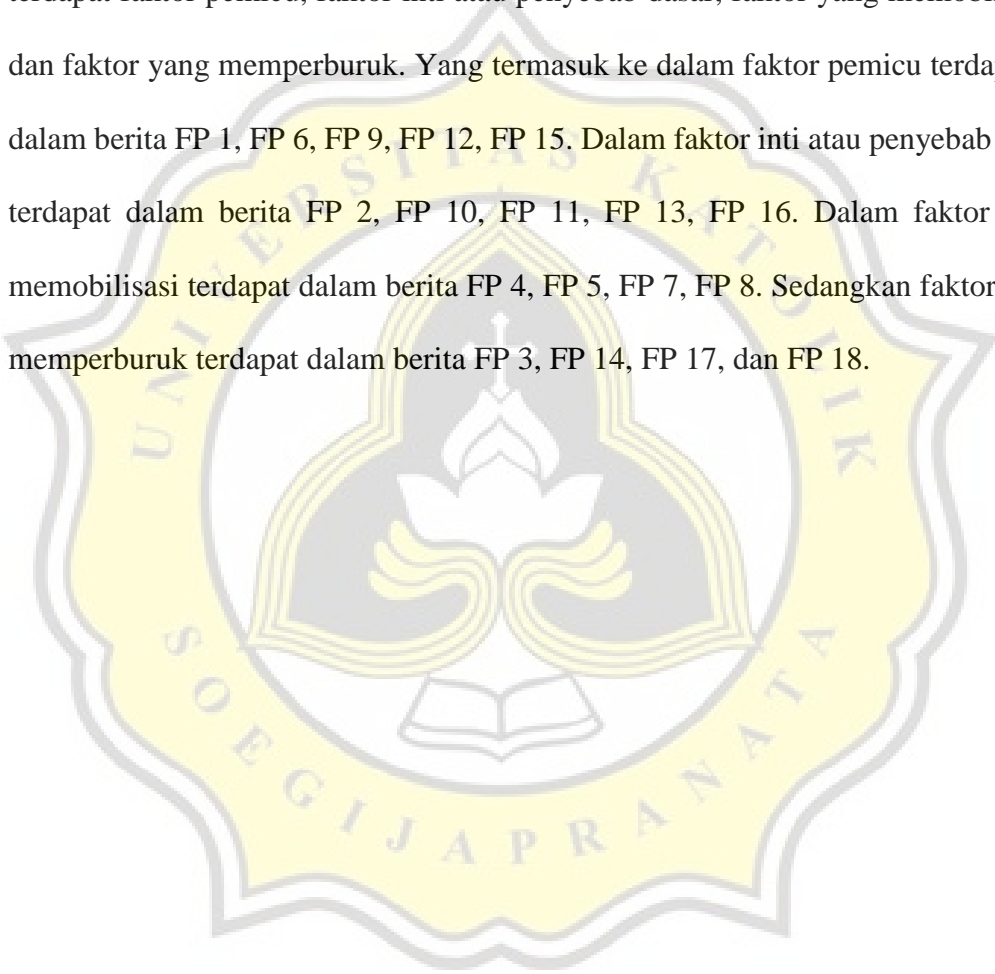
<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Penyerangan dilakukan anggota KKB saat acara bakar batu, yang dihadiri oleh Bupati, Komandan Kodim, Kepala Polres, pejabat daerah dan warga.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Berkumpulnya beberapa orang penting di satu tempat
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pemilihan moral)	Adanya usaha KKB untuk melakukan penyerangan terhadap beberapa subjek vital seperti Bupati, Komandan Kodim, dan Kapolres, karena berkumpul di satu tempat saat prosesi acara bakar batu.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan solusi)	TNI dan POLRI yang bertugas bersiaga ketat dilokasi acara, sehingga tidak adanya korban jiwa dalam peristiwa penyerangan tersebut.

Berdasarkan framing FP 18 di atas, dapat dianalisis bahwa motif penyerangan adalah berkumpulnya orang-orang penting di acara bakar batu yang dilaksanakan di Ilaga Kabupaten Puncak. Adapun acara bakar batu dilakukan sebagai bentuk syukur dari pulihnya kondisi keamanan di wilayah tersebut. Namun ternyata kondisi yang diduga sudah aman ini ditepis oleh anggota KKB dengan cara mengacaukan acara dengan cara menembaki peserta dari jauh. Namun penyerangan tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa.

Pada bagian FP 18 ini, komunikatornya yaitu Komandan Korem 173/PVB Brigadir Jenderal TNI Iwan Setiawan. Pesan yang diambil dari pernyataan di atas yaitu adanya perkiraan kelompok yang menyerang saat upacara bakar batu

diselenggarakan. Bagi masyarakat yang membaca, memberikan jaminan bahwa Tim Namengkawi sudah mengerti harus bertindak apa dan kepada siapa.

Dari 18 berita yang menjadi fokus penelitian ini, peneliti menelaah berdasarkan faktor-faktor penyebab konflik yang dijelaskan oleh Jamil (2007), diketahui terdapat faktor pemicu, faktor inti atau penyebab dasar, faktor yang memobilisasi, dan faktor yang memperburuk. Yang termasuk ke dalam faktor pemicu terdapat di dalam berita FP 1, FP 6, FP 9, FP 12, FP 15. Dalam faktor inti atau penyebab dasar terdapat dalam berita FP 2, FP 10, FP 11, FP 13, FP 16. Dalam faktor yang memobilisasi terdapat dalam berita FP 4, FP 5, FP 7, FP 8. Sedangkan faktor yang memperburuk terdapat dalam berita FP 3, FP 14, FP 17, dan FP 18.



4.4 Komunikator Politik

Analisa komunikator politik erat kaitannya dengan pembahasan tentang aktor komunikasi politik yang tertuang di dalam pemberitaan. Berdasarkan 18 berita tentang peristiwa KKB dan TNI-POLRI baku tembak yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka didapatkan komunikator masing-masing berita pada Tabel 4.21 sebagai berikut :

Tabel 4.21
Komunikator Politik

No.	Kode Berita	Komunikator Politik	Isi Komunikasi
1.	FP 1	Dandrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan Kapolres Puncak AKBP Dicky Saragih	Memberikan penjelasan atas informasi adanya prajurit yang kena tembak pada peristiwa baku tembak dengan KKB pada Selasa, 9 Februari 2021.
2.	FP 2	Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Kamal	Pembenaran atas insiden baku tembak di sekitar Bandara Ilaga yang menewaskan satu anggota KKB.
3.	FP 3	Kapolres Puncak AKBP Dicky Saragih	Identitas anggota KKB yang tewas bernama Tera Wamang KKB Kodap III
4.	FP 4	Presiden RI Ir. Joko Widodo	Merasa geram dengan kematian dari Brigadir Jenderal TNI I Putu Danny yang merupakan Kepala BIN Daerah Papua dan dikenal dekat dengan masyarakat Papua. Presiden dengan tegas memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk segera mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB.

		Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto	Memberikan keterangan kronologi kejadian kematian Kabinda Papua.
5.	FP 5	Kepala Biro Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono	Polri merespon instruksi Presiden untuk menumpas habis keberadaan KKB, namun saat ini Polri memaksimalkan Operasi Nemangkawi yang merupakan Operasi Gabungan Polri dengan TNI.
6.	FP 6	Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri	Pembenaran atas peristiwa satu anggota Brimob tewas dalam baku tembak dengan anggota KKB di Kampung Lumawi.
7.	FP 7	Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Qupdusy	Informasi tentang 9 anggota KKB tewas dalam kontak senjata dengan Satgas Operasi Nemangkawi. Dan mengumumkan bahwa Lekagak Telenggen Pimpinan KKB termasuk ke dalam DPO dengan nomor DPQ/43/VIII/2020 Reskrim Mimika
8.	FP 8	Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD	Melakukan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa anggota KKB Papua merupakan anggota Teroris yang harus ditumpas habis.
9.	FP 9	Gubernur Papua Lukas Enembe	Memberikan respon dengan tujuh poin pernyataan terkait dengan pengkategorian KKB sebagai kelompok Teroris.
10.	FP 10	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy	Pemerintah Papua siap mengikuti arahan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat.
11.	FP 11	Ketua Komnas HAM Papua Frits Bernard Ramandey	Memberikan saran kepada Panglima TNI dan Kapolri mengenai pentingnya menyelesaikan konflik di Papua dengan mengedepankan kemanusiaan dan prajurit yang ditugaskan di Papua harus memiliki pengetahuan tentang budaya masyarakat disana, sehingga kecil kemungkinan menimbulkan konflik yang lebih besar.
12.	FP 12	Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono	Menerangkan kebenaran adanya dua anggota KKB yang tewas akibat baku tembak antara Tim Satgas Namengkawi dengan anggota KKB di hutan pada tanggal 13 Mei 2021 di Kampung Wuloni, Ilaga.
13.	FP 13	Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri	Menyatakan bahwa 2 anggota Operasi Namengkawi yang tertembak dalam kondisi yang stabil
14.	FP 14	Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri	Kapolda Papua menyatakan langkah penyekatan mobilitas di daerah Ilaga dilakukan untuk membatasi ruang gerak KKB dengan warga sipil untuk saling berinteraksi.
15.	FP 15	Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Iqbal Al Qupdusy	Memberikan pernyataan bahwa Tim Satgas Namengkawi berhasil merebut wilayah Camp

			Mayuberi, hasil dari kontak senjata dengan anggota KKB di Jembatan Mayuberi.
16.	FP 16	Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD	Memberikan pernyataan bahwasanya langkah penetapan KKB sebagai kelompok Teroris membuahkan hasil yang positif.
17.	FP 17	Kapolres Puncak Kompol Nyoman Punia	Memberikan informasi serangan anggota KKB yang menyebabkan satu kendaraan taktis Polri rusak. Namun situasi disekitar TKP cenderung kondusif dan normal.
18.	FP 18	Komandan Korem 173/PVB Brigadir Jenderal TNI Iwan Setiawan	Memberikan keterangan informasi bahwa adanya usaha untuk mengganggu acara Bakar batu yang dilakukan oleh kelompok KKB.

Sumber : Olahan peneliti melalui situs Fajarpapua.com

Dari keseluruhan berita, tidak semua narasumber bisa dianggap sebagai seorang komunikator politik. Terdapat tiga jenis komunikator utama yaitu komunikator politikus, komunikator profesional, komunikator aktivis. Seorang narasumber dapat disebut sebagai seorang aktor komunikasi politik apabila pernyataan yang mereka sampaikan kepada khalayak bertujuan untuk membentuk sebuah citra diri mereka atas pesan politik yang disampaikan, hal ini merupakan bentuk dari komunikasi politik.

Berikut beberapa pengelompokkan kategori komunikator antara komunikator politikus, profesional, aktivis pada Tabel 4.22 di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.22
Kategori Komunikator Politik

Kategori	Komunikator
Politikus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden RI Ir. Joko Widodo 2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD 3. Gubernur Papua Lukas Enembe 4. Sekda Provinsi Papua Dance Y. Flassy 5. Dandrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan 6. Kapolres Puncak AKBP Dicky Saragih 7. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Kamal 8. Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto 9. Kepala Biro Masyarakat Divisi Humas Brigjen Pol Rusdi Hartono

	10. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri 11. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Qupdusy 12. Kapolres Puncak Kompol Nyoman
Professional	-
Aktivis	-

Sumber : Olahan peneliti melalui situs Fajarpapua.com

Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat diketahui dari 18 berita yang dianalisis *framing*, terdapat 12 komunikator politik yakni komunikator politikus dari Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua, dan Instansi Aparat Keamanan TNI dan Polri. Peneliti tidak menemukan adanya komunikator profesional dan komunikator aktivis di dalam 18 berita yang di analisis *framing*.

Komunikator politik dari 18 berita di atas, memiliki tujuan politiknya masing-masing. Presiden Joko Widodo pada berita FP 4 memberikan kesan politik yaitu penegasan terhadap keberadaan KKB yang mulai meresahkan negara. Ketegasan tersebut ditunjuk dengan pernyataan Presiden Jokowi yang memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Selanjutnya pada berita FP 5, berdasarkan kelanjutan dari instruksi Presiden Jokowi untuk menumpas habis KKB, hal ini direspon dengan cepat oleh Kepolisian Republik Indonesia (RI). Hal ini dengan jelas dapat dikatakan adalah pesan terbuka dari Kepala Negara kepada instrument negara yang memiliki kemampuan untuk melakukannya seperti TNI dan Kepolisian.

Komunikator politik selanjutnya yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dari 18 berita, Mahfud MD menjadi komunikator politik di berita FP 8 dan FP 16. Mahfud MD memberikan pengumuman bahwa KKB merupakan organisasi teroris yang harus ditumpas. Penglabelan KKB

menjadi organisasi teroris merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Papua Lukas Enembe, muncul di berita FP 9 dimana poin utama yang dikomunikasikannya berkaitan dengan penglabelan KKB sebagai teroris oleh Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Lukas Enembe memainkan peran sebagai pemimpin daerah Papua yang menjadi wilayah kepemimpinannya. Di dalam berita FP 9, Lukas memberikan tujuh pernyataan sebagai respon atas pengumuman KKB merupakan kelompok teroris.

Komunikator politik selanjutnya ialah Sekda Provinsi Papua Dance Y. Flassy. Sekda menjadi komunikator politikus di berita FP 10. Dance mewakili Pemerintah Daerah Papua dalam pertemuannya dengan Panglima TNI dan Kapolri di Rimba Hotel. Dance memberikan pernyataan bahwa Pemerintah Daerah Papua akan mematuhi dan mendukung langkah Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Peneliti melakukan wawancara awal terhadap Stefanus Ambing sebagai pendiri Fajarpapua.com, di dalam wawancara tersebut Stefanus menjelaskan bahwa dirinya merasa termotivasi untuk menggeluti lagi dunia media karena merasa prihatin dengan cara-cara media khususnya di Papua dalam melakukan pemberitaan dan masih tingginya Hoaks di dalam pemberitaan kasus konflik. Panggilan hati untuk mengemas berita yang sebenarnya, membuat Stefanus merasa harus memegang prinsip hanya memberitakan kebenaran.

Menurut Pimpinan Redaksi Fajarpapua.com Stefanus Ambing, “dalam ranah jurnalistik Fajarpapua.com memiliki tujuan untuk menyadarkan semua pihak, bahwasanya di dalam mengatasi konflik perlu untuk digaris bawahi tidak adanya konflik kepentingan, baik dari KKB ataupun TNI-POLRI. Dialog yang selama ini terbangun belum efektif dan belum sampai ke akar permasalahan, sehingga konflik belum juga terselesaikan.” Pimpinan Redaksi Fajarpapua.com dengan tegas menyatakan, “dalam pelaksanaan etika jurnalistik, kami tim Fajarpapua.com menjadikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan setia terhadap NKRI.” (wawancara Lamp. 3, hal.b-c) sehingga Fajarpapua.com tetap berpegang pada NKRI harga mati, dan menganggap KKB merupakan gerakan penyimpangan atas Negara yang harus diselesaikan.

Hal ini ditunjukkan pada saat Menko Polhukam mengklaim KKB merupakan organisasi teroris, berita-berita setelah pernyataan Menteri Polhukam tersebut juga menggunakan kata “Teroris” dalam penyebutan KKB. Hal ini dilakukan juga untuk tujuan, tidak ada ruang bagi gerakan separatis di NKRI ini. Fajarpapua.com berfokus pada penonjolan kronologis peristiwa yang terjadi dan juga penonjolan pada hal-hal yang menyangkut dengan warga sipil.

Fajarpapua.com menyatakan tidak mentoleransikan atas segala bentuk kekerasan baik dari sisi TNI dan Polri ataupun dari sisi KKB. Sehingga berita-berita yang disajikan setidaknya memiliki unsur kebenaran atau apa adanya. Mengenai pemberitaan yang disajikan, Stefanus menjelaskan “apabila wartawan Fajarpapua.com dekat dengan lokasi kejadian berita, maka akan turun tangan langsung untuk menelusuri informasinya. Namun apabila tidak ada wartawan yang

berada disana, maka Fajarpapua.com akan menanyakan atau mencari informasi dari Pimpinan atau orang yang memiliki kewenangan seperti Komandan Dandrem, Kapolda, ataupun Kapolres, tergantung dari isi berita tersebut. Dalam pemberitaan, apabila berita berkaitan dengan warga sipil, maka secara otomatis akan menekankan pada informasi tersebut. Hal ini dikarenakan warga sipil selalu menjadi korban atas keadaan yang ada.” (wawancara Lamp. 3, hal.f).

Stefanus menjelaskan dalam membuat atau menentukan narasumber di setiap berita yang disajikan, “tim akan mencari keterangan dari pihak penegak hukum atau pimpinan instansinya. Penentuan narasumber juga mengikuti etika jurnalistik yang ada, dimana apabila berita tersebut berada dikewenangan kepolisian tingkat kota dan kabupaten maka kemungkinan besar akan dimintai keterangan ialah Kapolres, namun apabila tingkat provinsi maka akan dimintai keterangan adalah Kapolda.” (wawancara Lamp.3, hal.g-h) Stefanus juga menjelaskan mengapa di setiap berita biasanya terdapat dua atau lebih narasumber. Hal ini dilakukan agar kualitas berita lebih baik apabila sumber tersebut memiliki pembandingan.

Peneliti menelaah dari keseluruhan berita, pihak Fajarpapua.com cenderung memilih narasumber dari instansi negara terkait, tidak mencari keterangan dari pihak yang berlawanan (anggota KKB) ataupun warga yang menjadi saksi, korban ataupun berada di tempat kejadian. Setelah peneliti konfirmasi hal ini kepada Stefanus, beliau menjawab untuk akses ke anggota KKB tidak dimungkinkan terjadi, namun apabila anggota KKB mengirimkan video atau keterangan kepada Fajarpapua.com maka akan di posting.

Alasan mengapa tim jurnalistik tidak mencari keterangan dari warga yang bisa menjadi saksi ataupun korban karena area konflik ini membuat situasi menjadi genting, adanya keterbatasan yang diberikan aparat setempat untuk mengakses kepada korban yang selamat, karena korban kebanyakan merasakan tekanan sehingga trauma atau apabila warga menjadi korban kebanyakan meninggal dunia. Namun pesan tersirat yang bisa peneliti dapatkan dari kecenderungan Fajarpapua.com dalam mencari narasumber ini, mereka cenderung mencari dari sumber yang memiliki wewenang penuh atas insiden-insiden yang terjadi (yaitu pihak pemerintah, pihak Satgas Namengkawi atau TNI-Polri).

Setelah peneliti melakukan analisis *framing* model Robert Entman dan melakukan wawancara dengan Pimpinan Redaksi Fajarpapua.com, peneliti menyimpulkan bahwa berita-berita yang dimuat oleh Fajarpapua.com memiliki *framing* yang jelas. Fajarpapua.com memberikan gambaran jelas tentang topik yang diberitakan, tokoh-tokoh yang terlibat, hal yang ditonjolkan di dalam berita dan mengedepankan kronologi kejadian.

Dimana secara pembawaan berita dan perangkaian peristiwa dilakukan secara apa adanya dan mudah dipahami oleh khalayak pembaca. Aktor komunikator politik yang ada di dalam 18 berita yang peneliti fokuskan memiliki peran yang penting dalam menyampaikan opini, pandangan dan sikapnya kepada publik. Sehingga publik memiliki wawasan akan kejadian-kejadian yang terjadi di Papua, khususnya berkaitan dengan KKB. Peristiwa baku tembak antara TNI-POLRI dengan anggota KKB disampaikan secara terperinci dan mayoritas menyertakan kronologi kejadian, sehingga lebih jelas.

Adapun berita yang disajikan sebanyak 18 berita, memiliki rentang waktu dari bulan Februari 2021 hingga bulan Juli 2021. Penonjolan yang dilakukan Fajarpapua.com pada rentang waktu tersebut antara lain, Pertama, korban khususnya dari pihak warga sipil dan prajurit yang bertugas saat suatu insiden terjadi. Kedua, pengumuman pelabelan KKB menjadi organisasi teroris. Ketiga, respon pihak terkait seperti Pemerintah Daerah Papua tentang penetapan KKB menjadi organisasi teroris. Keempat, anggota KKB yang tewas dalam peristiwa baku tembak. Kelima, perkembangan konflik dan insiden baku tembak antara TNI-POLRI dengan KKB. Dengan demikian, didapatkan fakta bahwa Fajarpapua.com sebagai media *online* memiliki kemampuan untuk mengungkap kebenaran dari setiap berita yang disajikannya.